



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2017

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

2018

KATA PENGANTAR

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar pada tahun 2017 mencapai hasil yang baik dimana hal tersebut terlihat dari pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja SKPD 2017 yang merupakan janji Kepala Dinas kepada Gubernur Kalimantan Barat. Hasil tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kerja Tahun Anggaran 2017 dengan mengakomodir Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Perindag Prov. Kalbar di dalam Renstra 2013-2018 telah menetapkan lima sasaran strategis dengan 44 indikator kinerja utama (IKU), selain juga bertanggung jawab atas pengumpulan data 4 (empat) IKU Pemerintah Provinsi. Pada Tahun 2017 terdapat perubahan Rencana Strategis 2013-2018 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindag Prov. Kalbar nomor 159 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun 2013-2018 tanggal 4 Desember 2017 dimana perubahan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perubahan RPJMD Kalbar Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

Rerata capaian kinerja IKU Dinas menunjukkan dari 35 IKU dinas yang dilaksanakan 32 IKU mencapai nilai 100% atau lebih, 2 (dua) IKU tidak mencapai 100% (97,50% dan 83,33%). Sedangkan IKU Pemprov menunjukkan 3 (tiga) IKU mencapai kinerja 100% atau lebih dan 1 (satu) IKU mencapai 97,89%. Sementara realisasi anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN secara berurutan adalah 95,36% dan 90,23% dimana anggaran sumber dana APBN tersebut merupakan anggaran pasca pengurangan anggaran sebesar 13,3%.

Hal-hal yang menjadi perhatian utama yang perlu disikapi secara serius pada tahun 2017 dan tahun-tahun ke depan adalah masih tidak stabilnya perdagangan dunia, tren peningkatan laju pertumbuhan industri pengolahan yang masih dibawah tren laju pertumbuhan ekonomi Kalbar secara keseluruhan yang berakibat pada kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kalbar yang juga terus melanjutkan tren penurunannya, tingginya laju inflasi di Kalimantan Barat yang masih diatas inflasi nasional, kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah berlaku, serta masih rendahnya kemampuan IKM Kalbar sebagai penggerak perekonomian rakyat untuk bersaing di pasar internasional terutama menghadapi pasar MEA.

Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2017 yang disusun ini berdasarkan hasil kinerja Dinas Perindag pada tahun 2017 pada masa kepemimpinan Kepala Dinas Periode tahun yang bersangkutan. Sebagai penutup semoga LKJ Tahun 2017 ini dapat bermanfaat sebagai sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus juga sebagai sarana evaluasi bagi kami segenap jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 2018

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat,

MUHAMMAD RIDWAN, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP.19600310 198203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	8
A. GAMBARAN UMUM	8
A.1. Pendahuluan.....	8
A.2. Susunan Organisasi.....	8
A.3. Tugas dan Fungsi	10
A.4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	11
A.5. Sumber Daya Keuangan.....	12
A.6. Sarana Dan Prasarana.....	13
B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU-ISU STRATEGIS	13
B.1. Perindustrian.....	14
B.2. Perdagangan	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. RENCANA STRATEGIS.....	19
A.1 Visi.....	19
A.2. Misi.....	20
A.3. Moto	20
A.4 Tujuan Dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama.....	20
B. PERJANJIAN KINERJA	27
C. IKU PROVINSI	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI	31
A.1 Tumbuh Dan Berkembangnya Sektor Industri Kalbar (SS1)	31
A.2 Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah Kalbar (SS2).....	37

A.3 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Yang Didukung Dengan Pengamanan Perdagangan Daerah (SS3).....	42
A.4 Peningkatan Ekspor Daerah Dan Pengendalian Impor (SS4)	64
A.5. Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal Dan Internal Organisasi (SS5)....	77
A.5. Pencapaian Target IKU Pemprov Kalbar 2017	82
B. REALISASI ANGGARAN	84
B.1. SASARAN STRATEGIS 1 (SS1)	85
B.2. SASARAN STRATEGIS 2 (SS2)	85
B.3. SASARAN STRATEGIS 3 (SS3)	86
B.4. SASARAN STRATEGIS 4 (SS4)	86
B.5. SASARAN STRATEGIS 5 (SS5)	87
BAB IV PENUTUP	88
A. KESIMPULAN.....	88
B. SARAN.....	91
B.1. Permasalahan.....	91
B.2. Solusi	92
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai negeri sipil Dinas Perindag Prov. Kalbar (per 31 desember 2017)	12
Tabel 2 Anggaran Dilingkungan Dinas Perindag Provinsi Kalbar yang Bersumber dari APBD 2017	12
Tabel 3 Rekapitulasi Keuangan yang Bersumber dari APBN 2017	13
Tabel 4. Perkembangan Neraca Perdagangan Kalimantan Barat 2008 s/d 2017	15
Tabel 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindag Prov. Kalbar	25
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2017	27
Tabel 7 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017	29
Tabel 8 IKU Provinsi dan Target 2017 dalam RPJMD Provinsi Kalbar Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Perindag Provinsi Kalbar.	30
Tabel 9 Capaian Kinerja TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR (SS1)	31
Tabel 10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
Tabel 11 Perkembangan Pencapaian Target Tahunan 2015 – 2017 (SS1)	33
Tabel 12 Capaian Kinerja TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KALBAR (SS2)	37
Tabel 13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
Tabel 14 Perkembangan Pencapaian Target Tahunan 2015 – 2017 (SS2)	38
Tabel 15 Capaian kinerja peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah (SS3)	42
Tabel 16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
Tabel 17 Perkembangan Pencapaian Target Tahunan SS 3 Tahun 2015 – 2017 (SS3)	44
Tabel 18 Capaian Kinerja PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR (SS4)	64
Tabel 19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
Tabel 20 Perkembangan Pencapaian Target Tahunan 2015 – 2017 (SS4)	66
Tabel 21 Eksportir Baru Tahun 2017	71
Tabel 22 PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KONTAK DAGANG DAN KOMODITI YANG DIMINATI	74
Tabel 23 Capaian Kinerja PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN EKSTERNAL DAN INTERNAL ORGANISASI (SS5)	77
Tabel 24 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	78
Tabel 25 Perkembangan Pencapaian Target Tahunan 2015 – 2017 (SS5)	79
Tabel 26 Capaian Target IKU Pemprov Kalbar 2017	82
Tabel 27 Rekapitulasi realisasi Anggaran per Program	84
Tabel 28 Rekapitulasi realisasi Anggaran Dekonsentrasi APBN TA. 2017	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perindag Prov. Kalbar	9
Gambar 2 Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang	10
Gambar 3 Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah.....	10
Gambar 4 Logo Aku Cinta Indonesia (100% INDONESIA).....	17
Gambar 5 Perbandingan Pertumbuhan Industri Tahun 2012-2017	34
Gambar 6 Perkembangan Inflasi Nasional dan Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2017	45
Gambar 7 Perkembangan Neraca Perdagangan Kalbar 2010-2017.....	67
Gambar 8 Komposisi Kontribusi Ekspor KALBAR 2017.....	68
Gambar 9 Komposisi Kontribusi Impor KALBAR 2017	69
Gambar 10 Perkembangan Harga Komoditi UnggulanKalbar di Dunia Tahun 2014-2017	70

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	93
LAMPIRAN 2 TARGET KINERJA TAHUN 2018	96
LAMPIRAN 3 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	98

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

A.1. Pendahuluan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan penggabungan dari Dinas Perindustrian Dati I Kalimantan Barat dengan Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, pada Tahun 2001 berkaitan dengan diterapkannya Otonomi Daerah. Dinas ini berkedudukan di Kota Pontianak dan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta merupakan salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas Umum Pemerintahan (pelayanan publik) dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis dan 1 (satu) unit pelatihan yaitu, Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (UPSMB) dan Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah (UP-IKM). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat beserta unit-unit pendukungnya dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung oleh dana APBN.

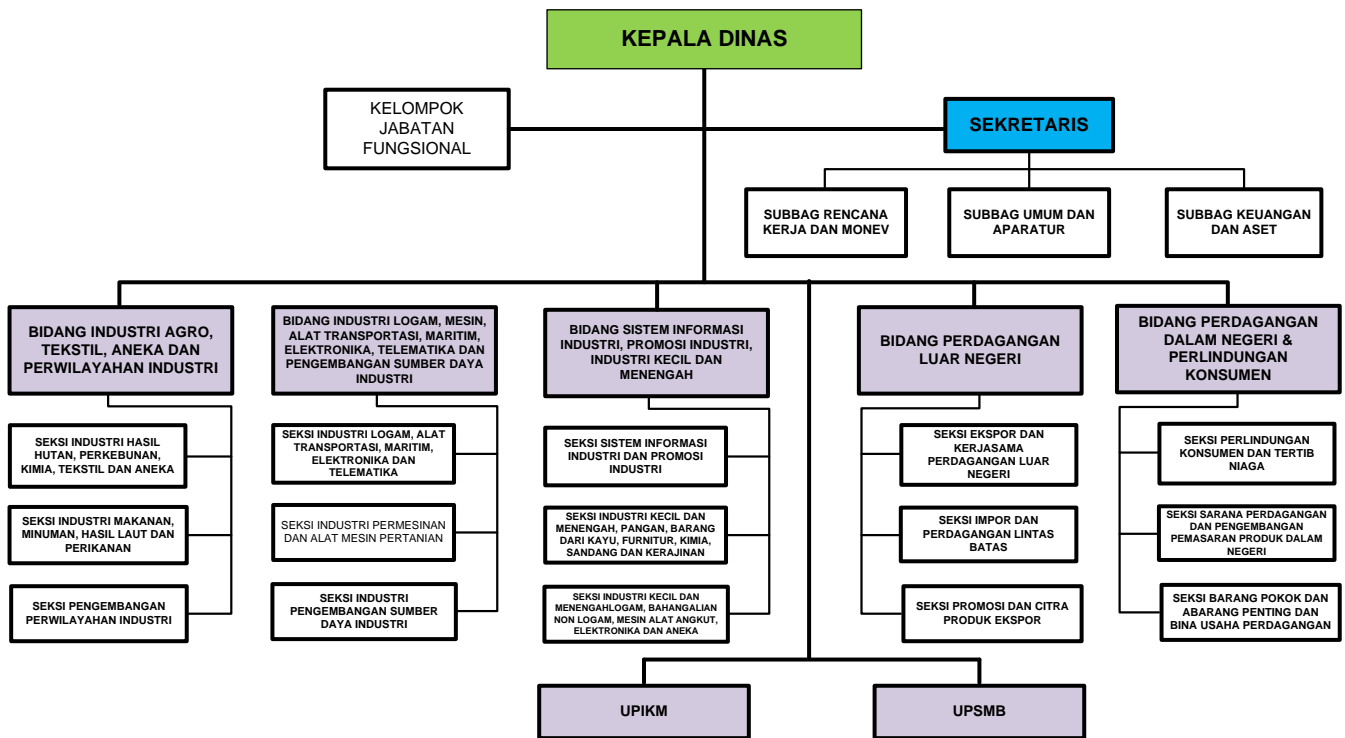
A.2. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mengenai telah dibentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, maka atas dasar ketentuan

tersebut urusan / bidang Perindustrian dan Perdagangan menjadi tanggung jawab dan kewenangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Berikut struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 119 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

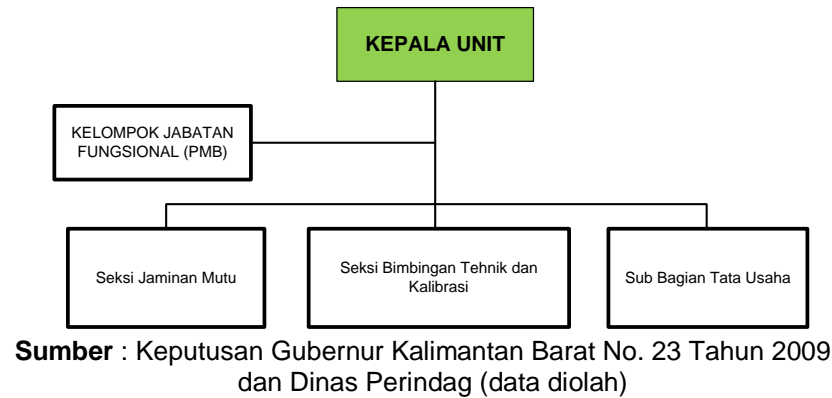
GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAG PROV. KALBAR



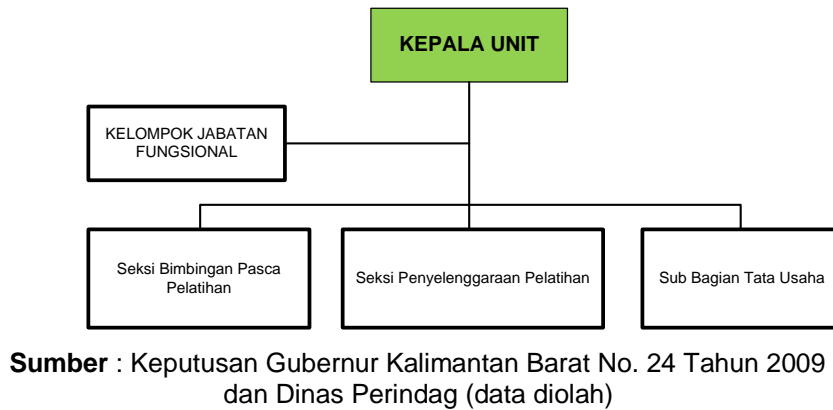
Sumber : Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 119 Tahun 2016

Selanjutnya untuk mengetahui struktur organisasi UPT dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada gambar-gambar berikut :

GAMBAR 2 UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



GAMBAR 3 UNIT PELATIHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH



A.3. Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan program kerja di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;

- b. Perumusan kebijakan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- f. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

A.4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, maka untuk menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Perdagangan, didukung oleh kondisi sumber daya aparatur, sebagai berikut :

**TABEL 1 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERINDAG
PROV. KALBAR (PER 31 DESEMBER 2017)**

No	Bidang / UPT	Jumlah Pegawai	Eselon			Pangkat / Golongan				Tingkat Pendidikan					
			II	III	IV	I	II	III	IV	S2	S1	D3	SMA	SM P	SD
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84	1	6	18	0	8	67	9	9	39	7	29	0	0
2	UPSMB	19	0	1	3	0	4	14	1	2	10	0	7	0	0
3	UP IKM	16	0	1	3	0	3	12	1	1	6	1	8	0	0
Total		119	1	8	24	0	15	93	11	12	55	8	44	0	0

Sumber Data :Kepegawaian Dinas Perindag Prov. Kalbar, 2018.

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 119 orang, dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (D3 – S2) sebesar 63,03% (dengan jumlah lulusan S2 sebanyak 12 orang atau 10,08%), Pendidikan Menengah Atas (SLTA) sebesar 36,97%, dengan demikian secara tingkat pendidikan pada dasarnya telah cukup memadai untuk mengemban tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan terutama dalam mengembangkan industri dan perdagangan daerah. Jumlah pegawai Dinas Perindag Prov. Kalbar sebanyak 119 orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 69 orang (57,98% dari total pegawai) dan perempuan sebanyak 50 orang (42,02% dari total pegawai).

A.5. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun anggaran 2017 menerima anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung baik yang dialokasikan di Dinas itu sendiri maupun yang dialokasikan di UPT.

TABEL 2 ANGGARAN DILINGKUNGAN DINAS PERINDAG PROVINSI KALBAR YANG BERSUMBER DARI APBD 2017

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA
TOTAL BELANJA		25.180.567.262
BELANJA TDAK LANGSUNG		13.974.623.762
BELANJA LANGSUNG		11,205,943,500
2.06.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8,445,943,500
2.06.01.02	UNIT PELATIHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	1,480,000,000
2.06.01.05	UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	1,280,000,000

Sumber : Dinas Perindag Prov. Kalbar, 2017.

Sementara itu anggaran yang bersumber dari APBN 2017 berasal dari Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI.

TABEL 3 REKAPITULASI KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI APBN 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA SETELAH PERUBAHAN
1	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	1,196,048,000
2	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	1,450,000,000
3	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	538,958,000
TOTAL		3,185,006,000

Sumber : Dinas Perindag Prov. Kalbar, 2017.

A.6. Sarana Dan Prasarana

Dari sisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menempati kantor di jalan Sutan Syahrir no. 2 Pontianak, kondisi kantor Dinas Perindag untuk saat ini sudah mengalami perluasan sehingga kondisi kerja sudah terasa relatif nyaman karena sudah dapat menampung para pegawai yang ada secara layak sehingga pelayanan umum yang diberikan pun sudah tidak terganggu lagi. Namun masih ada beberapa ruangan yang harus di perbaiki terutama lantai dua gedung lama eks-Kanwil Depperindag Prov. Kalbar yang perlu direhab. Demikian juga lingkungan kantor perlu dilakukan perbaikan mengingat kerap terjadi banjir pada saat hujan intensitas tinggi. Dalam pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat, sebagai SKPD Provinsi di bidang industri dan Perdagangan, untuk saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat masih memerlukan tersedianya ruangan pameran dan yang berguna untuk menjadi tempat pameran tetap dan display produk industri dan perdagangan di Kalbardan tempat diskusi / tukar menukar informasi antar pelaku usaha dan dengan aparat.

B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU-ISU STRATEGIS

Potensi Sumber daya alam baik pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan Kalbar sangat tinggi dan diindikasikan menjadi *supplier* bagi Negara-negara tetangga dan China yang lebih menikmati nilai tambah karena terjadinya perlambatan pertumbuhan sektor industri Kalbar. Disisi lain berdasarkan target Indikator Makro Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat, tahun 2017 bahwa pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,14%, yang diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan menjadi 4,92%

dan angka pengangguran menjadi 3,13%. Selanjutnya untuk IPM/HDI sebesar 74,46%.

Selain itu saat ini telah terbitnya **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah** yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu UU no 32 tahun 2004. UU ini diharapkan dapat dicermati dan menjadi acuan bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan di daerah termasuk bidang industri dan perdagangan; disusul pada awal tahun 2015 juga telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran atas program TRISAKTI yaitu 1) berdaulat secara politik, 2) berkari secara ekonomi, dan 3) berkepribadian secara sosial & budaya, dengan 9 (sembilan) agenda prioritas atau yang dikenal dengan NAWA CITA yang merupakan janji Presiden terpilih Indonesia, Joko Widodo.

Untuk itu beberapa isu-isu penting di bidang industri dan perdagangan yang menjadi perhatian adalah :

B.1. Perindustrian

Sektor industri sampai dengan tahun 2017 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Walaupun demikian, dalam satu dasawarsa terakhir peranannya terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan pertumbuhan setiap tahunnya selalu dibawah pertumbuhan ekonomi Kalbar. Pada tahun 2000 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kalimantan Barat sebesar 24,15 persen, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 16,11 persen. Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 sebesar 16,10 persen.

Selain berakibat pada lambannya pergerakan perekonomian Kalbar, kondisi tersebut menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari komoditi-komoditi primer Kalbar yang cenderung meningkat akhir-akhir ini terutama sektor pertanian (termasuk perkebunan) dan pertambangan. Penurunan peranan sektor industri terutama disebabkan menurunnya kinerja industri kayu dan perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu relatif peningkatan nilai tambahnya sangat kecil. Kondisi tersebut mau tidak mau mengharuskan Kalimantan Barat mencari alternatif bagi pengembangan industri lain yang memberi dayaungkit terhadap perekonomian. Bagaimanapun kedepan daerah Kalbar harus segera menerapkan strategi percepatan proses transformasi sektor industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah produksi, berdaya saing dan efisien. Percepatan penumbuhan Kawasan Industri untuk

lokalisasi pemenuhan infrastruktur dan pengendalian lingkungan serta upaya pengembangan dan penyebaran IKM hingga ke desa dapat menjadi jalan percepatan pengembangan sektor industri daerah.

B.2. Perdagangan

Sektor perdagangan, disisi lain, semakin memberikan peranan yang penting dalam perekonomian daerah dengan menggeserkan peranan industri. Namun demikian secara umum perdagangan Kalbar masih dihadapkan berbagai masalah seperti Ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh produk-produk hulu dengan dominasi beberapa komoditi seperti karet, bauksit dan hasil tambang lainnya serta kayu. Total nilai dan volume ekspor Kalbar juga masih sangat fluktuatif dan tergantung pada Negara tujuan ekspor tradisional seperti US, China, Korea, Jepang, dan Singapura. Dan permasalahan penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batas yang memberikan eksese negatif terhadap perdagangan dalam negeri (merembesnya bahan pangan illegal dari negara tetangga ke Kalbar seperti gula) dan industri dalam negeri (merembesnya bokar ke negara tetangga).

Neraca perdagangan Kalbarsampai dengan tahun 2011 menunjukkan trend yang meningkat tajam, namun sejak tahun 2012 menurun akibat pembatasan ekspor bahan tambang sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mulai mengalami kontraksi yang cukup kuat hingga puncaknya pada tahun 2015 pertama kali dalam sejarah terjadi defisit neraca perdagangan Kalbar. Namun demikian, hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena peningkatan importasi Kalbar lebih disebabkan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang investasi sawit dan pengolahan alumina, dan diprediksi neraca tahun 2017 kembali surplus

TABEL 4. PERKEMBANGAN NERACA PERDAGANGAN KALIMANTAN BARAT 2008 s/D 2017

Tahun	EKSPOR		IMPOR		NERACA PERDAGANGAN	
	(US\$) F.O.B	Pertum b yoy (%)	(US\$) C.I.F	Pertumb yoy (%)	(US\$)	Pertumb yoy (%)
2010	922.052.102	71,88	153.833.298	-2,62	768.218.804	102,97
2011	1.867.796.771	102,57	298.443.471	94,00	1.569.353.300	104,28
2012	1.300.863.351	-30,35	539.364.364	80,73	761.498.987	-51,48
2013	1.348.607.972	3,67	498.236.319	-7,63	850.371.653	11,67
2014	651.986.280	-51,65	500.262.690	0,41	151.723.590	-82,16
2015	564.043.389	-13,49	627.820.186	25,50	-63.776.797	-142,03
2016	623.420.000	10,53	351.840.000	-43,96	271.580.000	525,83
2017	827.300.000	32,70	269.070.000	-23,52	558.230.000	105,55

Sumber : BPS Kalbar, 2018. (data diolah)

Pertumbuhan Ekonomi Kalbar saat ini masih dibentuk utamanya oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berkisar antara 52 – 56 % dari PDRB Kalbar dan ekspor hanya berperan sebesar 22 – 31 % dalam kurun 2008 – 2012. Hal ini menunjukkan pasar Kalimantan Barat cukup besar dan jika dapat dimanfaatkan untuk penumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan barang dan jasa oleh pengusaha lokal terutama UMKM, maka akan sangat membantu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kalbar yang lebih berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan sisi produksi baik itu untuk barang konsumsi sektor primer misalnya pertanian, juga untuk barang-barang industri (olahan).

Masyarakat Ekonomi Asean / Asean economic Community (MEA/AEC 2015). Secara bertahap ASEAN yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja memastikan diri masuk dalam babak baru perbatasan geoekonomi dan geopolitik global. Salah satu keputusan strategis tersebut yaitu pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand Desember 2009, semua negara-negara ASEAN telah meratifikasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan sepakat Piagam ASEAN memasuki tahap *entry to force*, sehingga tiga pilar ASEAN Community yang meliputi **ASEAN Economic Community, ASEAN Security Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community** akan segera diimplementasikan dan ditargetkan terintegrasi penuh pada tahun 2015¹, Pembentukan ASEAN Community tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN sehingga mampu menghadapi persaingan pada lingkup regional dan global. Beberapa isu terpenting dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN, antara lain kesiapan dunia usaha baik daerah dan nasional untuk menghadapi persaingan dengan ASEAN baik di dalam negeri maupun di pasar ASEAN, serta kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia menyambut MEA 2015. *Namun hal mendasar yang harus mendapatkan perhatian semua pemangku kepentingan di daerah dan nasional, khususnya dunia usaha, adalah pentingnya perubahan cara pandang dalam menyikapi persaingan yang timbul dari AEC 2015.* Persaingan dari luar tidak lagi dianggap sebagai ancaman, namun sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. *Karena kunci kemenangan dalam pasar bebas adalah daya saing.* Untuk itu, pemerintah daerah bersama dengan Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan daya saing bagi produk barang dan jasa Indonesia. Hal itu dilakukan antara lain untuk menjamin perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual, memberikan perlindungan konsumen, meningkatkan arus investasi sektor infrastruktur, dan menyempurnakan kebijakan insentif dan disinsentif

¹ yang semula ditargetkan pada tahun 2020 sesuai hasil KTT Asean 1997, namun dipercepat implementasinya menjadi tahun 2015 sesuai hasil KTT di Cebu pada tahun 2007, dan pada akhirnya pada tahun 2013 berdasarkan hasil evaluasi bersama negara-negara Asean diundur pelaksanaan menjadi 1 januari 2016.

yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha yang berdaya saing utamanya sektor industri dan perdagangan. Sekaligus juga melakukan upaya-upaya menggalakan penggunaan produk dalam negeri.

“Siapakah Kalbar menyediakan kebutuhan masyarakat Kalbar terutama pangan dalam jumlah cukup dan berkualitas ?” baik dari hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri. Untuk itu peranan industri dan perdagangan dalam menunjang kemandirian pangan daerah sangat krusial. Mulai dari penguatan industri yang mendukung mekanisasi & sarana produksi pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, sarana distribusi dan pemasarannya serta penerapan standarisasi dan keamanan pangan yang dihasilkan



GAMBAR 4 LOGO AKU CINTA INDONESIA (100% INDONESIA)

Instrumen gerakan Aku Cinta Produk Indonesia (100% Indonesia) dapat dikembangkan menjadi Gerakan Aku Cinta Produk Kalbar dan Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk pengamanan perdagangan dalam menghadapi implementasi MEA 2015 sekaligus meningkatkan laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dilihat dari PDRB Penggunaan Kalbar dalam 5 (lima) tahun terakhir (2008-2012) komponen yang dominan adalah Konsumsi Rumah Tangga dimana rata-rata pada kurun waktu tersebut mencapai diatas 52 %, dan merupakan potensi basis pasar pengembangan daya saing industri dan perdagangan daerah.

Perlindungan Konsumen, Namun demikian di sisi lain berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan konsumen merupakan salah satu kewenangan yang berada di tingkat provinsi, untuk di Kalimantan Barat sendiri masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan luas wilayah yang terdiri dari 14 kab/kota dengan jarak tempuh yang jauh sangat sulit untuk dapat memaksimalkan pengawasan tersebut.

Program Etalase Nasional. Program ini diluncurkan Presiden pada saat Peninjauan ke Entikong, Sanggau beberapa waktu yang lalu. Keinginan Presiden sangat sederhana, yaitu **agar daerah perbatasan Indonesia termasuk di Kalimantan Barat harus lebih baik dari negara tetangga.** Untuk itu Presiden menuntut Kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk segera mewujudkan hal tersebut pada tahun ini juga. Respon Bapak Presiden ini terhadap daerah perbatasan, tidak hanya, harus segera ditindaklanjuti dengan cepat dan cermat oleh daerah (Provinsi & Kab), namun juga diharapkan agar dalam perencanaan pembangunan daerah perbatasan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Kalbar dan Nasional. Sehingga strategi pembangunan daerah perbatasan, juga merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah dan Nasional. Kalbar harus dapat memanfaatkan daerah perbatasan sebagai potensi dan peluang untuk meningkatkan daya saing daerah (dan nasional)serta kesejahteraan masyarakat. Karena secara alamiah daerah perbatasan seperti di Kalbar sesungguhnya merupakan **daerah pertemuan dua sumber daya kedua negara** tersebut. Sehingga di beberapa negara dunia, **daerah perbatasan dijadikan daerah cepat tumbuh.** Kalimantan Barat **harus dapat memanfaatkan daerah perbatasan** dan sumberdaya yang ada di Sarawak, Malaysia untuk meningkatkan daya saing Kalbar terutama aksesibilitas Sarawak ke dan dari pasar dunia dengan dukungan infrastruktur dan pelabuhannya yang sangat baik. Untuk itu kita harus mampu membangun Terminal Barang Ekspor-impor yang didukung dengan pembangunan sentra produksi dan kawasan industri, sehingga barang-barang yang kita ekspor utamanya adalah barang-barang yang telah diolah dengan nilai tambah tinggi.

Pembangunan Pelabuhan Kijing dan rencana **Pembangunan Rel Kereta Api** di Kalimantan Barat. Kedua hal ini harus segera didukung dengan perencanaan dan pembangunan pusat-pusat produksi dan pusat-pusat distribusi. Diharapkan sentra produksi pertanian dan sentra produksi industri terutama kawasan industri di Kalimantan Barat terhubung dengan pelabuhan dan rel kereta api. Dan diharapkan Kalimantan Barat dalam **sistim logistik nasional** dapat ditingkatkan dari **hanya sebagai pusat distribusi provinsi (PDP)** menjadi **pusat distribusi regional (PDR)**, mengingat pusat distribusi Kalbar tidak hanya melayani wilayah Kalimantan Barat, tetapi juga pulau-pulau terluar Provinsi lain misalnya Kepulauan Natuna. Saat ini berdasarkan sistim logistik nasional PDP Kalbar bersama-sama Kaltim dan Kalteng **menginduk kepada PDR Banjarmasin-Kalsel.** **Pusat Distribusi** ini kedepannya dalam Sislognas akan **memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan barang-barang pokok dan barang-barang strategis** di wilayah yang dilayaninya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

A.1 Visi

“Terwujudnya Industri Yang Maju Dan Perdagangan Yang Tangguh Guna Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Barat”

- Industri yang maju mengandung makna bahwa pembangunan industri di Kalbar maju pada pengolahan hasil sumber-sumber daya utama daerah, seimbang dalam struktur (industri besar-menengah-kecil dan antara hulu-hilir), dan dipersiapkan untuk tidak tersebar tetapi pemusatan lokasi industri untuk kemudahan penyediaan infrastruktur & pengendalian lingkungan. Industri maju juga berarti maju dalam penyerapan tenaga kerja dan berbasis inovasi yang terus menerus.
- Perdagangan yang tangguh mengandung makna bahwa perdagangan di Kalbar diarahkan pada sistem dan distribusi perdagangan yang sehat dan efisien baik kedalam maupun keluar Kalbar bagi para pelaku perdagangan dan memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen di Kalbar (dari gejolak kelangkaan stok utamanya bahan pokok & strategis serta keamanan konsumen) sehingga mampu menciptakan perdagangan daerah yang memiliki daya saing dan berketahanan yang tinggi yang pada akhirnya mampu berperan didalam perdagangan regional maupun internasional.
- Guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor perindustrian dan perdagangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat berupa sumbangan PDRB sektor industri dan perdagangan yang tinggi dan tidak hanya dinikmati oleh Usaha Menengah – Besar tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah sehingga dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kalbar.

A.2. Misi

1. Menumbuh kembangkan sektor industri untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perindustrian daerah Kalimantan Barat
2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kalimantan Barat.

A.3. Moto

Industri Maju dan Perdagangan Tangguh untuk pertumbuhan, pemerataan dan kesejahteraan Kalbar

A.4 Tujuan Dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

a) Tujuan dan Sasaran Strategis

Melalui pelaksanaan misinya, Dinas Perindag Provinsi Kalbar berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	
1	Revitalisasi dan penguatan struktur industri Kalbar	1	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalimantan Barat
		2	Tumbuh dan berkembangnya IKM Kalimantan Barat
2	Meningkatkan stabilitasi dan penguatan pasar lokal yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri	3	meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah
3	Meningkatkan perdagangan luar negeri daerah yang berkualitas	4	meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor
4	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang baik dan profesional	5	Meningkatan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi

b) Indikator Kinerja Utama

Sebagai bentuk penjabaran tujuan dan sasaran strategis diukur melalui Indikator Kinerja Utama setiap sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tumbuh dan berkembang sektor industri (SS 1)

Industri Kalbar sebagai sektor penggerak utama peningkatan nilai tambah harus tumbuh dan berkembang untuk kontribusi perekonomian daerah dan menghindari “*potential lost*” produk-produk primer yang dihasilkan Kalbar dan diarahkan untuk tumbuh & berkembang dengan basis pengolahan sumberdaya utama Kalbar terutama (pertambangan dan pertanian dalam arti luas) dan industri kreatifitas basis IT & seni budaya luhur daerah yang unik yang berkelanjutan.

Tumbuh dan berkembang sektor industri selain peningkat nilai tambah komoditi primer utama Kalbar, juga diharapkan tumbuh dan berkembang industri pendukung penggerak utama perekonomian daerah (pertambangan, pertanian dan perkebunan) terutama industri galangan kapal dan alat mesin pertanian (alsintan). Pengembangan industri galangan kapal diharapkan dapat menunjang perkapalan sebagai alat distribusi logistik dan produk dari dan ke sentra produksi, sehingga galangan kapal yang maju dapat mendorong efisiensi distribusi komoditi utama daerah.

Sedangkan pengembangan alsintan di Kalbar sangat diperlukan terutama dalam menunjang ketahanan pangan dan menjadikan Kalbar sebagai lumbung pangan dan energi di Pulau Kalimantan dan nasional. Fokus utama sampai dengan 2013 adalah penguatan dan pengembangan alsintan centre yang merupakan pilot project alsintan centre nasional di luar pulau Jawa.

2. Tumbuh dan berkembang Industri Kecil dan Menengah (SS2)

Industri Kecil dan menengah (IKM) harus dipekuat tumbuh dan berkembangnya, karena IKM dapat menjadi penyerap tenaga kerja, modernisasi masyarakat utamanya pedesaan, peningkatan pendapatan masyarakat, pemenuh kebutuhan masyarakat dan yang terpenting sebagai upaya memperkuat struktur industri Kalbar yang secara pendapatan masih dipegang industri sedang besar hingga 81,5% dari total pendapatan dan aset sebesar 79 % dari aset total sektor industri Kalbar walaupun populasi industri besar/sedang hanya 0,5% total populasi industri Kalbar (Sensus Ekonomi 2006, BPS Kalbar). Fasilitasi pengembangan penyebaran dan penguatan daya saing IKM daerah menjadi sasaran yang sangat penting dan krusial. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru IKM hingga di pedesaan serta peningkatan kemampuan SDM, peralatan, permodalan dan penerapan standarisasi IKM daerah akan menjadi perhatian utama. Dan peran UPTD pelatihan bagi Industri Kecil dan Menengah akan menjadi sangat penting dan krusial dalam meningkatkan kompetensi SDM IKM daerah.

3. Meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah (SS3)

Sistem distribusi perdagangan dalam negeri yang efisien akan nyata berpengaruh, pertama, terhadap daya saing produk-produk Kalbar dari sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran didalam maupun diluar daerah, dan kedua, terhadap ketersediaan stok bahan pokok dan strategis daerah, dimana Kalbar sebagaimana daerah diluar pulau Jawa lainnya masih dihadapkan pada sistim logistik yang sangat tidak handal penyebab ekonomi biaya tinggi akibat keterbatasan sarana dan prasarana dan infrastruktur logistik daerah. Untuk itu upaya-upaya untuk pengendalian inflasi, perluasan akses pasar produk Kalbar baik produk industri maupun non industri dan pengembangan sarana perdagangan menjadi sangat krusial.

Selain itu, Sistim distribusi yang efisien tidak akan menjadikan Kalbar menjadi daerah perdagangan yang tangguh jika tidak disertai dengan perlindungan bagi konsumen terhadap kepastian dan keamanan barang yang dibeli, terlebih lagi dengan banjirnya produk-produk negara luar terutama China dan Malaysia. Untuk itu perlu penguatan upaya-upaya perlindungan tidak hanya terhadap konsumen Kalbar tetapi juga para pelaku usahanya. Peran operasional pelayanan Kemetrolagian yang didukung kemampuan personil dan laboratorium yang baik serta pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten/kota akan menjadi alat krusial dalam Pengamanan perdagangan.

Pengamanan Perdagangan juga dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan ekonomi lokal, karena saat ini dengan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB penggunaan Kalbar dalam 5 (tahun) terakhir (2008 – 2012) masih selalu diatas 52 % PDRB Total Kalbar. Sehingga tindakan pengamanan perdagangan di sinergikan dengan gerakan aku cinta produk lokal dan gerakan konsumen cerdas akan memicu potensi ekonomi lokal pesat berkembang, karena yang dikonsumsi adalah produksi lokal dengan nilai tambah ada di lokal.

4. Meningkatnya Ekspor daerah dan terkendalinya impor (SS4)

Ekspor dan impor merupakan salah satu komponen utama dalam PDRB Kalbar, dan daerah yang maju adalah daerah yang mampu mengekspor produk dan jasa yang dihasilkannya. Ekspor Kalbar walaupun secara nilai menunjukkan trend peningkatan, namun jika diteliti ternyata peningkatan tersebut dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil ekspor barang mentah hasil tambang. Yang perlu diwaspadai pada tahun 2014, bahan baku tambang seperti bauksit akan dilarang untuk diekspor kecuali dalam bentuk setengah jadi atau jadi (UU Nomor 4/2009 tentang Mineral dan batubara). Hal ini dapat menyebabkan turun secara drastis nilai

ekspor Kalbar untuk tahun tersebut. Oleh sebab itu promosi produk-produk daerah di dalam dan di luar negeri dan ekspor komoditi-komoditi perkebunan seperti CPO dan Karet perlu ditingkatkan ekspornya untuk menggantikan peranan bauksit, terlebih CPO pada kenyataannya walaupun besar diproduksi di Kalbar namun tidak diekspor melalui Kalbar melainkan melalui pelabuhan lain di luar Kalbar.

Pengendalian impor perlu dilakukan untuk menjaga masuknya barang-barang konsumsi yang tidak layak dan berbahaya bagi konsumen, juga kaitannya dengan pengamanan produk-produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat akibat masuknya produk serupa dari luar negeri yang masal dan kualitasnya tidak dapat dijamin.

Pembinaan perdagangan lintas batas menjadi salah satu fokus lokasi pengembangan ekspor dan pengendalian impor, karena di daerah ini berbagai masalah berkaitan dengan perdagangan illegal sering muncul. Pengendalian impor dapat dilakukan melalui instrumen penerbitan angka pengenal impor (API) dan pemantauan masuknya barang impor dan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk selanjutnya menjadi bahan masukan bagi kebijakan pusat. Berdasarkan Petauraan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya pengurusan/penerbitan API sudah diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

Pengembangan ekspor dan pengendalian impor di Kalbar juga harus didukung dengan institusi daerah yang memberikan pelayanan kepada dunia usaha terhadap pemberlakuan standarisasi dunia. Untuk itu UPTD pengawasan dan sertifikasi mutu barang perlu ditingkatkan kemampuan personil dan kemampuan laboratoriumnya terutama yang melayani Uji standarisasi Komoditi ekspor dan kalibrasi alat-alat laboratorium. Selanjutnya UPTD ini dengan ketersediaan Sumber daya dan kemampuan pengujiannya (ruang lingkup yang telah terakreditasi) saat ini juga perlu untuk dikaji peningkatan peranannya seiring dengan diterbitkannya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membatasi daerah dalam menerima retribusi dan implementasi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, sehingga laboratorium pengujian yang telah didirikan dan dibiayai oleh pemerintah daerah Kalbar ini dapat membantu peningkatan daya saing dunia usaha untuk mengembangkan nilai dan pasar ekspornya dan mengawasi barang-barang impor agar sesuai dengan Standar yang berlaku dan aman bagi masyarakat.

5. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi (SS5)

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi adalah suatu hal yang wajib untuk mendukung pencapaian sasaran strategis lainnya. Peningkatan SDM personil, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja yang layak, perencanaan yang handal yang didukung ketersediaan data dan informasi yang akurat dan reliable, serta pengelolaan administrasi perkantoran yang tertib dan akuntabel menjadi hal pokok yang harus dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai SKPD yang bersinggungan langsung dan tidak langsung dengan dunia usaha dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting Disperindag. Oleh sebab itu, pembinaan kemampuan kompetensi dan disiplin pegawai Dinas menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil kinerja yang optimal. Disperindag Provinsi Kalimantan Barat bersama UPTD dibawahnya yang langsung bergerak pada pelayanan dunia usaha dan masyarakat harus didukung dengan peningkatan kompetensi aparatur yang profesional dan responsif terhadap dinamika di dunia usaha dan masyarakat serta dinamika lokal, nasional hingga global. Selain itu, Dinas Perindag provinsi Kalbar perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, agar merangsang upaya terbaik dari pegawai di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai. Tidak saja sistem manajemen kepegawaian yang baik, tersedianya standar operasional pelayanan yang baku, fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja juga perlu disediakan termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Disperindag Provinsi Kalbar

Hal lain yang tidak kalah penting adalah Perencanaan. Perencanaan kerja yang baik akan sangat membantu kejelasan dan pencapaian kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD. Perencanaan kerja juga merupakan sarana bagi SKPD untuk belajar dan berkembang. Demikain pula Pengelolaan keuangan Negara, dimana pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Perencanaan kerja dan pengelolaan administrasi perkantoran juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga lebih tepat dan berdaya guna. Akhirnya, untuk melakukan manajemen organisasi yang baik SKPD juga harus mempunyai data basis terkait tupoksi dalam bentuk data statistic dan dalam konteks keruangan (spatial) sejalan dengan amanat pembentukan Jaringan Data Spatial (JDSP) di daerah.

Tabel 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindag Prov. Kalbar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Program	Penanggung Jawab	
1	2	3		4	5	6	
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1	Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar pertahun	%	PROGRAM INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN	Bidang IAKTA PI	
		1.2	Jumlah pertambahan industri	%			
		1.3	Jumlah kawasan industri yang difasilitasi	Kawasan			
		1.4	Dukungan persebaran dan penguatan industri	Kab/Kota			
		1.5	Jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi	Unit Usaha			
		1.6	Jumlah industri prioritas provinsi yang difasilitasi	Unit Usaha			
		1.7	Jumlah industri yang difasilitasi melalui penerapan industri hijau	Unit Usaha			
		1.8	Jumlah rekomendasi IUI	Dokumen			
		1.9	Dukungan pengembangan Alsintan Center	Kab/Kota	Program Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka		Bidang ILMATMET PSDI
		1.10	Pengembangan Industri Alat Angkut	Unit Usaha			
		1.11	Pengembangan Industri Galangan Kapal	Lokasi			
		1.12	Dukungan hilirisasi bahan tambang	Komoditi			
2	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KALBAR	2.1	Pertumbuhan jumlah IKM formal Kalbar	%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKM DAN INDUSTRI KREATIF	Bidang SIIPI IKM dan UPIKM	
		2.2	Jumlah IKM Kalbar yang difasilitasi	Unit Usaha			
		2.3	Sentra Industri kreatif berbasis IT	Lokasi			
		2.4	Jumlah IKM Wirausaha baru yang tumbuh dan berkembang / Sektor Industri Pengolahan	Unit Usaha (IKM)			
3	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	3.1	Laju inflasi Kalimantan Barat	%	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Bidang PDN	
		3.2	Produk yang dipromosikan dalam negeri	Jenis			
		3.3	Jumlah Gudang dengan sistem resi gudang	Unit			
		3.4	Jumlah pasar tradisional yang dibina	Pasar			
		3.5	Jumlah SIUP, TDP, dan TDG yang terdata	Perusahaan			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Program	Penanggung Jawab
1	2	3		4	5	6
		3.6	Jumlah pengaduan Konsumen	Kasus	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Bidang PDN dan UPT Metrologi
		3.7	Jumlah wajib tera/tera ulang	Orang		
		3.8	Jumlah barang beredar yang diawasi	Jenis		
		3.9	Jumlah BPSK yang terbentuk	Kab/ Kota		
		3.10	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab Kemetrolgian	%		
		3.11	Peningkatan Jumlah dan kompetensi SDM Kemetrolgian	Orang		
		3.12	Jumlah Alat UTTP yang ditera / tera ulang	Unit		
		3.13	Persentase Kecamatan yang dilayani	%		
4	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	4.1	Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ Juta	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Bidang PLN
		4.2	Pelayanan Dokumen Ekspor Impor Secara Online	Dokumen		
		4.3	Jumlah eksportir baru	Unit Usaha		
		4.4	Jumlah Kontak dagang	Kali		
		4.5	Neraca Perdagangan	US\$ Juta	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING DAN PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Bidang PLN dan UPSMB
		4.6	Kerjasama Ekonomi regional	Dokumen		
		4.7	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab. Pengujian dan Kalibrasi sertifikasi mutu barang	Ruang Lingkup		
		4.8	Jumlah SDM fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya	Orang		
		4.9	Jumlah pengujian mutu produk	Sample		
		4.10	Jumlah kalibrasi alat lab	Alat		
5	PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN EKSTERNAL DAN INTERNAL ORGANISASI	5.1	Operasional pelayanan Kantor	Bulan	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAERAH	Sekretariat
		5.2	Jumlah dokumen perencanaan indag Kalbar	Dokumen		
		5.3	Data spasial indag Kalbar	Kab/Kota		
		5.4	Peningkatan SDM aparatur indag	Orang		
		5.5	Jumlah forum sinergi pengembangan indag	Forum		

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar dan Gubernur Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, dengan format seperti yang digambarkan dalam matriks di bawah:

TABEL 6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1.	Laju Pertumbuhan sektor Industri Kalbar pertahun	3 %
		1.2.	Jumlah Pertambahan industri	2 %
		1.3.	Jumlah kawasan industri yang difasilitasi	4 Kawasan
		1.4.	Dukungan persebaran dan penguatan industri	6 Kab/Kota
		1.5.	Jumlah industriunggulan provinsi yang difasilitasi	2 Unit Usaha
		1.6.	Jumlah industri prioritas provinsi yang difasilitasi	-
		1.7.	Jumlah industri yang difasilitasi melalui penerapan industri hijau	-
		1.8.	Jumlah Rekomendasi IUI	-
		1.9.	Dukungan pengembangan Alsintan center	1 Kab/Kota
		1.10.	Pengembangan Industri Alat Angkut	1 Kab/Kota
		1.11.	Pengembangan Industri Galangan Kapal	-
		1.12.	Dukungan hilirisasi bahan tambang	1 Lokasi
2	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KALBAR	2.1	Pertumbuhan jumlah IKM formal Kalbar	2 %
		2.2	Jumlah IKM Kalbar yang difasilitasi	80 Unit Usaha
		2.3	Sentra industri kreatif basis IT	1 Lokasi
		2.4	Jumlah IKM Wirausaha baru yang tumbuh dan berkembang	175 Unit Usaha
		2.5	Sektor Industri Pengolahan	175 IKM
3	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	3.1	Laju Inflasi Kalimantan Barat	5 %
		3.2	produk yang dipromosikan dalam negeri	10 Jenis
		3.3	Jumlah Gudang dengan sistem resi gudang	2 Unit
		3.4	Jumlah pasar tradisional yang dibina	4 Pasar
		3.5	Jumlah SIUP, TDP dan TDG yang terdata	5.000 Perusahaan
		3.6	Jumlah pengaduan Konsumen	60 Kasus
		3.7	Jumlah wajib tera/tera ulang	-
		3.8	Jumlah barang beredar yang diawasi	18 Jenis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
		3.9	Jumlah BPSK yang terbentuk	6 Kab/ Kota
		3.10	Pemeliharaan dan peningkatan Kemampuan Lab Kemetrolgian	-
		3.11	Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Kemetrolgian	-
		3.12	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	-
		3.13	Persentase Kecamatan yang dilayani	-
		3.14	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	1.142
		3.15	Produktivitas total daerah	18.07
		3.16	Nilai Tukar Petani	102.87
4	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	4.1	Neraca Perdagangan	US\$ 200 Juta
		4.2	Kerjasama Ekonomi Regional	1 Dokumen
		4.3	Jumlah eksportir baru	10 Unit Usaha
		4.4	Jumlah Kontak dagang	10 Kali
		4.5	Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ 675 Juta
		4.6	Pelayanan Dokumen Ekspor Impor Secara Online	1.900 Dokumen
		4.7	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab.Pengujian & Kalibrasi sertifikasi mutu barang	9 Ruang Lingkup
		4.8	Jumlah SDM fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya	2 Orang
		4.9	Jumlah Pengujian mutu produk	220 Sample
		4.10	Jumlah kalibrasi alat lab	350 Alat
5	PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN EKSTERNAL DAN INTERNAL ORGANISASI	5.1	Operasional pelayanan Kantor	12 Bulan
		5.2	Jumlah dokumen perencanaan Indag Kalbar	2 Dokumen
		5.3	Data spasial indag Kalbar	2 Kab/Kota
		5.4	Peningkatan SDM aparatur Indag	15 Orang
		5.5	Jumlah forum sinergi pengembangan Indag	1 Forum

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH)	Rp.	1.688.550.000	APBD
2.	Program Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA)	Rp.	703.969.000	APBD
3.	Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif	Rp.	1.047.481.000	APBD

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
	<i>Dukungan UPIKM</i>	Rp. 1.480.000.000	APBD
4.	Program Revitalisasi IKM	Rp. 1.450.000.000	APBN
5.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 811.789.500	APBD
6.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 468.894.000	APBD
7.	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 1.415.557.000	APBN
8.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 451.656.000	APBD
9.	Program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri	Rp. 288.344.000	APBD
	<i>Dukungan UPSMB</i>	Rp. 1.280.000.000	APBD
10.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Rp. 807.793.000	APBN
11.	Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan	Rp. 2.985.260.000	APBD
TOTAL		Rp. 14.879.293.500	APBD + APBN

Sehubungan dengan terjadinya pemotongan anggaran pada anggaran APBN 2017 dari Kementerian Perdagangan RI berdasarkan surat Menteri Perdagangan RI nomor 265/M-DAG/SD/3/2017 tanggal 20 Maret 2017 hal Pemberitahuan Alokasi Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 2017, maka dilakukan revisi/perbaikan Perjanjian Kinerja tahun 2017, dimana perubahan terjadi pada besaran anggaran saja dan tidak berpengaruh pada target dari Perjakin tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH)	Rp. 1.688.550.000	APBD
2.	Program Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA)	Rp. 703.969.000	APBD
3.	Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif	Rp. 1.047.481.000	APBD
	<i>Dukungan UPIKM</i>	Rp. 1.480.000.000	APBD
4.	Program Revitalisasi IKM	Rp. 1.450.000.000	APBN
5.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 811.789.500	APBD

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
6.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp.	468.894.000	APBD
7.	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	1.196.048.000	APBN
8.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	451.656.000	APBD
9.	Program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri	Rp.	288.344.000	APBD
	<i>Dukungan UPSMB</i>	Rp.	<i>1.280.000.000</i>	APBD
10.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Rp.	538.958.000	APBN
11.	Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan	Rp.	2.985.260.000	APBD
	TOTAL	Rp.	14.390.949.500	APBD + APBN

C. IKU PROVINSI

Sementara itu sesuai Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017, mengamanatkan Dinas Perindag Prov. Kalbar untuk mengevaluasi beberapa Indikator Kinerja Utama yang menjadi tugasnya, seperti tergambar dalam matrik di bawah ini:

TABEL 8 IKU PROVINSI DAN TARGET 2017 DALAM RPJMD PROVINSI KALBAR YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DINAS PERINDAG PROVINSI KALBAR.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017 DALAM RPJMD PROV KALBAR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
8.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah ekspor sektor perdagangan (US\$)	US\$ 2.075,07 Juta	DINAS PERINDAG
		Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	0,996 Juta/ bulan	
		Produktivitas total daerah	17,67 Juta/tahun / tenaga kerja	
		Nilai tukar petani	102,59 Poin	
		Sektor Industri Pengolahan	175 IKM	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat nomor 159 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Terdapat beberapa perubahan nama program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindag Prov. Kalbar yang akan digunakan pada tahun 2018, namun untuk penyusunan Laporan Kinerja 2017 ini masih menggunakan Rencana Strategis Dinas Perindag Prov. Kalbar 2013-2018 sebelum perubahan/revisi.

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Capaian kinerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 serta perbandingan dengan tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada matrik di bawah. Sebagai catatan, tahun anggaran 2017 merupakan tahun keempat Dinas Perindag Prov. Kalbar melaksanakan program dan kegiatan serta pencapaian IKU berdasarkan Renstra SKPD 2013-2018. Sejak tahun 2015, terjadi perubahan dalam perhitungan PDRB dari Sembilan sektor menjadi 17 kategori.

A.1 Tumbuh Dan Berkembangnya Sektor Industri Kalbar (SS1)

TABEL 9 CAPAIAN KINERJA TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR (SS1)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017	REALISASI	% (6/5)X100
1	2	3	4	5	6
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1 Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar pertahun	3%	3,05 %	101,67
		1.2 Jumlah pertambahan industri	2%	1,95%	97,50
		1.3 Jumlah kawasan industri yang difasilitasi	4 Kawasan	4 Kawasan	100
		1.4 Dukungan persebaran dan penguatan industri	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	100
		1.5 Jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi	2 Unit Usaha	8 Unit Usaha	400
		1.6 Jumlah industri prioritas provinsi yang difasilitasi	-	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017	REALISASI	% (6/5)X100
1	2	3	4	5	6
		1.7 Jumlah industri yang difasilitasi melalui penerapan industri hijau	-	-	-
		1.8 Jumlah rekomendasi IUI	-	-	-
		1.9 Dukungan pengembangan Alsintan Center	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	100
		1.10 Pengembangan Industri Alat Angkut	1 Unit Usaha	5 Unit Usaha	500
		1.11 Pengembangan Industri Galangan Kapal	-	-	-
		1.12 Dukungan hilirisasi bahan tambang	1 Komoditi	1 Komoditi	100
RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1					187,31

Secara umum, seluruh target IKU sasaran ini tercapai yaitu dari 8 (delapan) IKU dari 12 (duabelas) IKU yang terdapat pada Renstra. Keempat IKU yang tidak terealisasi karena keterbatasan ketersediaan pagu anggaran APBD tahun 2017, perubahan kewenangan, serta mengakomodir Perda yang telah ditetapkan.

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

TABEL 10 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Tumbuh Dan Berkembangnya Sektor Industri Kalbar	Pengembangan Industri Kimia Agro Dan Hasil Hutan	1.688.550.000	1.649.667.999	97,70	187,31	90,8
	Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika Dan Aneka	703.969.000	671.003.722	95,32		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,51% (rata-rata antara realisasi dua program) dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 187,31%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 90,8.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian berbagai indikator capaian juga merupakan bentuk dukungan dari Kab/Kota terkait dengan penumbuhan dan pengembangan sektor industri. Namun di lain sisi, pencapaian kinerja tersebut harus didukung oleh instansi vertikal lainnya untuk turut serta dalam menunjang hal-hal lain terkait dengan penumbuhan dan pengembangan sektor industri Kalbar.

Untuk melihat pencapaian target tahunan dari 2015 hingga 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 11 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN TARGET TAHUNAN 2015 – 2017 (SS1)

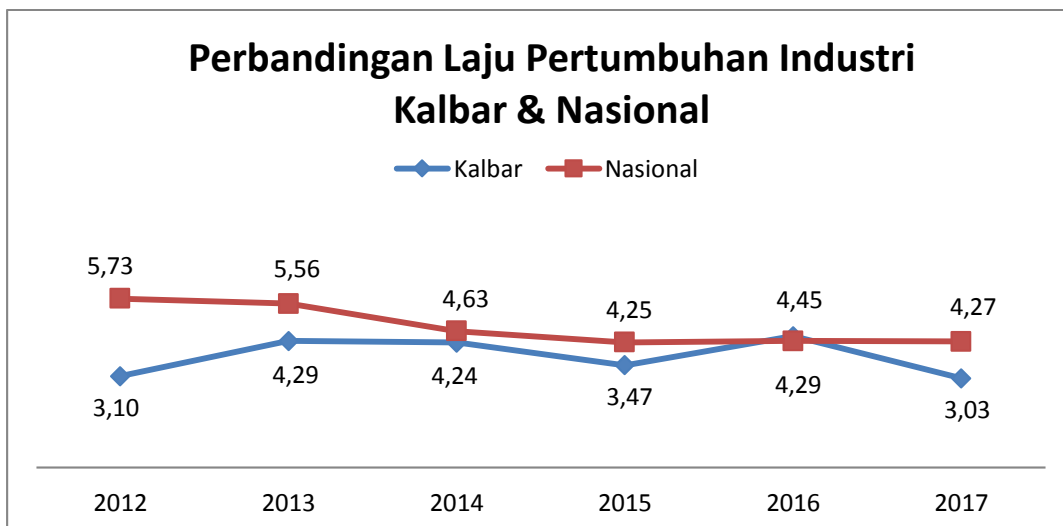
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Realisasi			Target 2018
					2015	2016	2017	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1	Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar pertahun	%	3,47	4,45	3,03	3,03
		1.2	Jumlah pertambahan industri	%	1,5	2,07	1,95	-
		1.3	Jumlah kawasan industri yang difasilitasi	Kawasan	4	4	4	-
		1.4	Dukungan persebaran dan penguatan industri	Kab/Kota	14	14	6	-
		1.5	Jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi	Unit Usaha	4	6	8	-
		1.6	Jumlah industri prioritas provinsi yang difasilitasi	Unit Usaha	17	29	-	-
		1.7	Jumlah industri yang difasilitasi melalui penerapan industri hijau	Unit Usaha	5	-	-	-
		1.8	Jumlah rekomendasi IUI	Dokumen	-	-	-	-
		1.9	Dukungan pengembangan Alsintan Center	Kab/Kota	1	1	1	-
		1.10	Pengembangan Industri Alat Angkut	Unit Usaha	1	-	5	-
		1.11	Pengembangan Industri Galangan Kapal	Lokasi	1	1	-	-
		1.12	Dukungan hilirisasi bahan tambang	Komoditi	1	-	1	1

Laju Pertumbuhan sektor industri Kalbar per tahun dan Laju Pertambahan Industri, Jika dibandingkan tahun 2016 dan 2017 dengan pertumbuhan industri sebesar 4,45% dan 3,03% (*c-to-c*), maka terjadi kecenderungan trend melambat/menurunnya laju pertumbuhan industri di Kalimantan Barat. Hal ini terkonfirmasi dari melemahnya kinerja industri manufaktur berskala besar dan sedang serta penurunan impor barang modal. Industri manufaktur besar dan sedang di Kalimantan Barat, yang dalam hal ini adalah industri pengolahan mineral alumina tercatat mengalami perlambatan. Dilihat dari komoditas, melambatnya pertumbuhan pada industri pengolahan terutama didorong oleh melemahnya kinerja industri pengolahan mineral alumina. Sementara di sisi lain kenaikan industri pengolahan CPO serta industri komoditas karet, menahan pelemahan lebih dalam.

Kondisi tersebut sejalan dengan melambatnya laju pertumbuhan industri nasional, dimana pada triwulan III tahun 2017 laju pertumbuhan industri nasional berada pada angka 4,27 % menurun/melambat jika dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 4,29 % (*c to c*).

Disisi lain, peningkatan laju pertumbuhan usaha konstruksi selama tahun 2017 utamanya didorong oleh realisasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur serta pembangunan residensial. Peningkatan kemajuan berbagai pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terefleksi melalui peningkatan penyerapan alokasi belanja APBN di wilayah Kalimantan Barat (prioritas pembangunan Kalimantan Barat). Dengan demikian, diharapkan ada campur tangan Pemerintah Pusat untuk dapat mendongkrak laju pertumbuhan industri Kalbar dengan tetap memandang potensi yang ada.

Gambar 5 Perbandingan Pertumbuhan Industri Tahun 2012-2017



Sumber : BPS Pusat & BPS Kalbar, 2018. (data diolah)

Jumlah kawasan industri yang difasilitasi, Jumlah kawasan industri yang difasilitasi pada tahun 2017 sejumlah 4 kawasan. Keempat kabupaten tersebut adalah kabupaten Sanggau (Kawasan Industri Tayan), Kabupaten Landak (KI Mandor), Kabupaten Sambas (KI Semparuk), dan Kabupaten Ketapang (KI Kendawangan). Sebagai gambaran saat ini 2 (dua) kawasan Industri yaitu KI Mandor dan KI kendawangan telah menjadi prioritas nasional, namun sampai dengan tahun 2017 belum terealisasi pembangunan kawasan industri dimaksud.

Dukungan Persebaran dan Penguatan Industri, Merupakan indikator dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan industri kabupaten/ kota di Kalimantan Barat. Dengan target sebanyak 6 kabupaten/kota yang terealisasi semuanya, dimana kegiatan pembinaan industri di Kalimantan Barat melalui APBD dengan tetap memperhatikan azas pemerataan. Diharapkan, pembinaan yang merata ini dapat mendorong pengembangan industri di Kalimantan Barat terutama IKM dan industri unggulan Kalbar kedepannya.

Jumlah Industri Unggulan Provinsi yang difasilitasi, Industri Unggulan Kalbar yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi unggulan daerah sesuai dengan RPIP Kalbar Tahun 2017-2037, yaitu :

- Industri pengolahan sawit
- Industri pengolahan karet
- Industri pengolahan kelapa
- Industri pengolahan bauksit
- Industri pengolahan hasil laut dan perikanan
- Industri pengolahan kayu
- Industri pengolahan hasil tanaman pangan

Namun dengan terbatasnya ketersediaan anggaran yang ada pada Tahun 2017, fasilitasi industri unggulan provinsi difokuskan pada industri Pangan dan Industri Hilir Karet dengan tetap memperhatikan industri unggulan lainnya. Selanjutnya dalam pencapaian IKU Tahun 2017 dengan jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi ditargetkan sebanyak 2 (dua) Unit Usaha, dan terealisasi sebanyak 8 (delapan) unit usaha dengan rincian sebanyak 5 (lima) unit usaha KUB Industri Pangan dan 3 (tiga) KUB Industri Hilir Karet.

Jumlah Industri Prioritas Provinsi yang difasilitasi, pada tahun 2017 indikator ini tidak digunakan karena mengingat telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat, penyebutan industri prioritas sudah tidak digunakan lagi, namun diganti menjadi industri unggulan.

Jumlah industri yang difasilitasi melalui penerapan industri hijau, Tidak ada realisasi terkait indikator dimaksud dikarenakan kegiatan yang mendukung IKU tersebut tidak dilaksanakan mengingat keterbatasan pagu anggaran APBD TA. 2017.

Jumlah Rekomendasi IUI yang diterbitkan, Tidak ada realisasi terkait indikator dimaksud berkenaan dengan pengalihan kewenangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 yang menyatakan bahwa kewenangan penerbitan IUI telah dilimpahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Menindaklanjuti perkembangan tersebut IKU 1.8 akan dipertimbangkan untuk dihapuskan sejalan dengan revisi Renstra yang rencananya akan disusun setelah ada perubahan/revisi RPJMD Provinsi Kalbar.

Dukungan pengembangan alsintan centre, Target yang ditetapkan 1 kab/kota yaitu di Kabupaten Kubu Raya dengan hasil 1 kabupaten, dimana kegiatan ini merupakan kegiatan lintas SKPD (dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar) yang merupakan tindak lanjut dari MOU lanjutan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dengan Pemprov. Kalbar sejak tahun 2014.

Pengembangan Industri Alat Angkut, Menyusun roadmap Industri Alat Angkut (alat transportasi dan maritim) yang menjadi acuan provinsi dan 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat dalam pengembangan industri alat angkut. Dari target yang telah ditetapkan 1 (satu) unit usaha, terealisasi 5 (lima) unit usaha (sebesar 500%) yang telah diakomodir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pengembangan Industri Galangan Kapal, Kegiatan ini tidak dianggarkan karena kondisi anggaran APBD yang dialokasikan di Dinas Perindag Prov. Kalbar pada tahun 2017 tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan industri galangan kapal.

Dukungan hilirisasi Bahan Tambang, Melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi perkembangan operasional industri CGA dan pembangunan SGA di Kendawangan Kab. Ketapang, dengan komoditi industri berupa tambang bauksit.

Selanjutnya berdasarkan perubahan/revisi Rencana Strategis Dinas Perindag Prov. Kalbar 2013 – 2018, di tahun 2018 Sasaran Strategis 1 (SS1) “Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kalbar” dan Sasaran Strategis 2 (SS2) “Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah Kalbar” akan digabung menjadi satu yaitu menjadi Sasaran Strategis 1 (SS1) “Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kalimantan Barat”.

- **Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis**

Tidak tercapainya target jumlah pertambahan industri Kalbar disebabkan belum optimalnya upaya hilirisasi industri di Kalbar dari segala sisi. Masalah permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri Kalbar. Beberapa hal tersebut menyebabkan pertambahan industri Kalbar Tahun 2017 cukup tinggi hanya pada usaha rumah tangga yang tidak memiliki legalitas formal.

- **Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya memfasilitasi percepatan penumbuhan Kawasan Industri Kalbar. Dengan terbangunnya Kawasan Industri Kalbar diharapkan dapat mempermudah akses perijinan sehingga mampu mempercepat hilirisasi produk di Kalbar.

A.2 Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah Kalbar (SS2)

TABEL 12 CAPAIAN KINERJA TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KALBAR (SS2)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2017	REALISASI	% (6/5)X100
1	2	3		4	5	6
2	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KALBAR	2.1	Pertumbuhan jumlah IKM formal Kalbar	2%	2,06%	103%
		2.2	Jumlah IKM Kalbar yang difasilitasi	80 Unit Usaha	100 Unit Usaha	125 %
		2.3	Sentra Industri kreatif berbasis IT	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %
		2.4	Jumlah IKM Wirausaha baru yang tumbuh dan berkembang	175 Unit Usaha	344 Unit Usaha	196,57%
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 2				

Terdapat 4 (empat) indikator pada sasaran strategis tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah Kalbar dimana pada tahun 2017 rata-rata pencapaiannya mencapai 131,14%. Hal tersebut tidak lepas dari peran Kab/Kota dalam memfasilitasi pencapaian tersebut.

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

TABEL 13 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Tumbuh Dan Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah Kalbar	Pengembangan IKM dan Industri Kreatif	2.527.481.000	2.459.272.704	97,30	131,14	33,84

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,30% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 131,14%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 33,84.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian berbagai indikator capaian ini merupakan bentuk dukungan yang tinggi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kab/Kota. Dengan tidak terpengaruhnya IKM terhadap perlemahan ekonomi global semakin memperkuat posisi IKM sebagai salah satu penopang ekonomi Indonesia. Sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian RI, penumbuhan wirausaha IKM diimplementasikan melalui fasilitas dan pembinaan dari segala sisi.

Untuk melihat pencapaian target tahunan dari 2015 hingga 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 14 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN TARGET TAHUNAN 2015 – 2017 (SS2)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Realisasi			Target
					2015	2016	2017	2018
					R	R	R	
1	2	3		4	5	6	7	8
2	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KALBAR	2.1	Pertumbuhan jumlah IKM formal Kalbar	%	0,76	2,19	2,06	-
		2.2	Jumlah IKM Kalbar yang difasilitasi	Unit Usaha	70	-	100	-
		2.3	Sentra Industri kreatif berbasis IT	Lokasi	1	1	1	-
		2.4	Jumlah IKM Wirausaha baru yang tumbuh dan berkembang	Unit Usaha (IKM)	136	304	344	-

Pertumbuhan jumlah IKM formal Kalbar, Pertumbuhan IKM formal Kalbar pada tahun 2017 tumbuh sebesar 2,06% dari target sebesar 2%. Pertumbuhan IKM formal mengacu pada IKM yang terdaftar dalam database Dinas Perindag Prov. Kalbar yang merupakan agregasi dari seluruh database yang ada di Kabupaten/kota se Kalimantan Barat. Agregasi laporan dari kab/kota kedepannya perlu dilakukan validasi mengingat beberapa kabupaten masih menyampaikan data yang sementara. Secara keseluruhan pertumbuhan IKM meningkat cukup tinggi, namun hal tersebut hanya sebatas usaha rumah tangga dan tidak memiliki legalitas formal. Untuk itu dibutuhkan upaya bersama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota untuk mendorong legalitas usaha seluruh IKM yang ada di Kalbar.

Jumlah IKM Kalbar Yang difasilitasi, merupakan kegiatan untuk memfasilitasi IKM baik dari sisi Pemasaran Produk, Kualitas Produk, maupun memperkuat kemitraan antar sesama Pelaku IKM di Kalbar pada tahun 2017. Pencapaian kinerja dari target 80 Unit Usaha dengan realisasi sebanyak 100 unit Usaha dimana kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

- Kegiatan Forum Komunikasi Alumni CEFÉ yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 14 s.d 15 Desember 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 40 Unit Usaha;
- Kegiatan Bimbingan dan Pendampingan Pasca Pelatihan sebanyak 15 Unit Usaha yang dilaksanakan di Kab. Mempawah (29 s.d 30 Maret 2017), dan Kab. Kubu Raya (21 s.d 24 Maret 2017).;
- Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan ke sentra kerajinan sebanyak 15 Unit Usaha yang dilaksanakan di Kab. Sambas (28 s.d 30 Agustus 2017, Kab. Kubu Raya (21 Juli 2017), dan Kab. Landak (22 s.d 24 Agustus 2017) ;
- Kegiatan Pelayanan Klinik Desain Merek dan Kemasan sebanyak 20 Unit Usaha yang dilaksanakan di Kota Pontianak (19 Juli dan 9 Oktober 2017), Kota Singkawang (16 s.d 18 Mei 2017), dan Kab. Landak (22 s.d 24 Agustus 2017);
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Berbasis OVOP yang dilaksanakan pada tahun 2017 di 6 Kabupaten/Kota sebanyak 10 Unit Usaha.

Sentra Industri kreatif basis IT, Pada tahun 2017 Dinas Perindag Prov. Kalbar melaksanakan kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri kreatif basis IT yang keluarannya antara lain pelatihan Industri IT. Hingga tahun 2017, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah belum tersedianya workshop pembinaan dan transfer *knowledge* bagi pelaku industri IT di Pontianak dan sekitarnya.

Jumlah IKM wirausaha baru yang tumbuh dan berkembang, Pencapaian target IKU di atas dilakukan dengan pelaksanaan pelatihan serta bimbingan teknis kepada para pelaku IKM Kalbar baik dari dana APBD maupun APBN. Tercatat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindag Prov. Kalbar, diantaranya :

- Kegiatan Pelatihan Teknis Manajemen Produksi dan Pemasaran Pelaku IKM yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 18 s.d 19 April 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang;
- Kegiatan Pelatihan Teknis Aneka Produk Kerajinan Berbasis Limbah yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 16 s.d 19 Mei 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro yang dilaksanakan di Kab. Landak pada tanggal 19 s.d 21 Juli 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu Produk Olahan IKM Pangan yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 11 s.d 12 Juli 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Pelatihan Teknis Aneka Produk Kerajinan Berbasis Kayu yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 16 s.d 19 Oktober 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 6 s.d 10 November 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang;
- Kegiatan Pelatihan Batik Tulis yang dilaksanakan di Kota Singkawang pada tanggal 4 s.d 7 April 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Pelatihan Service HP yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 4 s.d 7 April 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Pengembangan Produk Pande Besi yang dilaksanakan di Kabupaten Melawi pada tanggal 4s.d 7 Oktober 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Diklat Pengembangan Industri Kreatif Berbasis IT Pembuatan Film Cerita Pendek yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Rayapada tanggal 22 s.d 25 Maret 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Bimbingan Teknis Anyaman Bambu yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau pada tanggal 20-23 November 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Bimbingan Teknis Fashion dari Tenun Ikat yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang pada tanggal 14 s.d 17 November 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Bimbingan Teknis Anyaman Bambu yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang pada tanggal 11 s.d 14 Desember 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Bimbingan Teknis Kerajinan IKM Fashion yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 25 s.d 28 Oktober 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;

- Kegiatan Bimbingan Teknis Anyaman Bambu yang dilaksanakan di Kabupaten Sanggau pada tanggal 18 s.d 21 April 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;
- Kegiatan Bimbingan Teknis Anyaman Bambu dan Rotan yang dilaksanakan di Kabupaten Mempawah pada 16 s.d 19 Mei 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang;

Tercatat sebanyak 344 Unit Usaha (200 Unit Usaha SIIP IKM & 144 Unit Usaha UPIKM) yang diberikan pelatihan maupun bimbingan teknis pada tahun 2017. Realisasi tersebut jauh melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 175 Unit Usaha IKM (pada perjanjian kinerja Dinas) dan 175 IKM pada Target RPJMD Kalbar untuk tahun 2017.

Berdasarkan perubahan/revisi Rencana Strategis Dinas Perindag Prov. Kalbar 2013 – 2018, di tahun 2018 telah dilakukan penggabungan antara Sasaran Strategis 1 (SS1) “Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kalbar” dan Sasaran Strategis 2 (SS2) “Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah Kalbar” menjadi Sasaran Strategis 1 (SS1) “Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kalimantan Barat”. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 1 (SS1) dan Sasaran Strategis 2 (SS2) akan digabung menjadi satu. Untuk pembahasan dalam Laporan Kinerja Tahun 2017, target IKU di tahun 2018 pada SS2 digabung pada SS1.

- **Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis**

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian strategis ini yaitu masih kurangnya kesadaran pelaku IKM dalam legalitas unit usahanya. Hal tersebut menyebabkan sulitnya memfasilitasi IKM tersebut dari sisi promosi dan bantuan lainnya. Selain itu, pendataan IKM yang tidak memiliki legalitas formal sulit didapatkan karena beberapa IKM hanya menjadikan hal tersebut bukan menjadi pendapatan utama namun hanya sebagai usaha sampingan.

- **Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya mendorong dan memfasilitasi dalam melegalkan unit usaha IKM. Selain itu, juga telah dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota untuk memberikan sosialisasi terhadap pentingnya legalitas unit usaha IKM dalam rangka pengembangan produk kedepannya.

A.3 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Yang Didukung Dengan Pengamanan Perdagangan Daerah (SS3)

TABEL 15 CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH (SS3)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2017	REALISASI	% (6/5)x100
1	2	3		4	5	6
3	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	3.1	Laju inflasi Kalimantan Barat	5 %	3,86	129,53
		3.2	Produk yang dipromosikan dalam negeri	10 Jenis	10 Jenis	100
		3.3	Jumlah Gudang dengan sistem resi gudang	2 Unit	2 Unit	100
		3.4	Jumlah pasar tradisional yang dibina	4 Pasar	4 Pasar	100
		3.5	Jumlah SIUP, TDP, dan TDG yang terdata	5.000 Perusahaan	7.876 Perusahaan	157,52
		3.6	Jumlah pengaduan Konsumen	60 Kasus	26 Kasus	230,80
		3.7	Jumlah wajib tera/tera ulang	-	-	-
		3.8	Jumlah barang beredar yang diawasi	18 Jenis	12 Jenis	100,00
		3.9	Jumlah BPSK yang terbentuk	6 Kab/ Kota	5 Kab/ Kota	83,33
		3.10	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab Kemetrolgian	-	-	-
		3.11	Peningkatan Jumlah dan kompetensi SDM Kemetrolgian	-	-	-
		3.12	Jumlah Alat UTTP yang ditera / tera ulang	-	-	-
		3.13	Persentase Kecamatan yang dilayani	-	-	-
RERATA CAPAIAN KINERJA SS 3						126,54

Secara umum, seluruh target IKU sasaran ini tercapai yaitu dari 8 (delapan) IKU dari 13 (tigabelas) IKU yang terdapat pada Renstra. Kelima IKU lainnya tidak dapat direalisasikan yang disebabkan adanya peralihan kewenangan dari Provinsi menjadi kewenangan Kab/Kota. Selanjutnya terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai yaitu Jumlah BPSK yang terbentuk.

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

TABEL 16 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Yang Didukung Dengan Pengamanan Perdagangan Daerah	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	468.894.000	443.425.000	94,57	126,54	36,46
	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	811.789.500	711.124.350	87,60		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,09% (rata-rata antara realisasi dua program) dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 126,54%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 36,46.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegagalan dalam pencapaian indikator Jumlah BPSK yang terbentuk lebih disebabkan oleh adanya peralihan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun kegagalan tersebut tidak mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator lainnya sehingga rata-rata pencapaian akhir sasaran strategis masih diatas 100%.

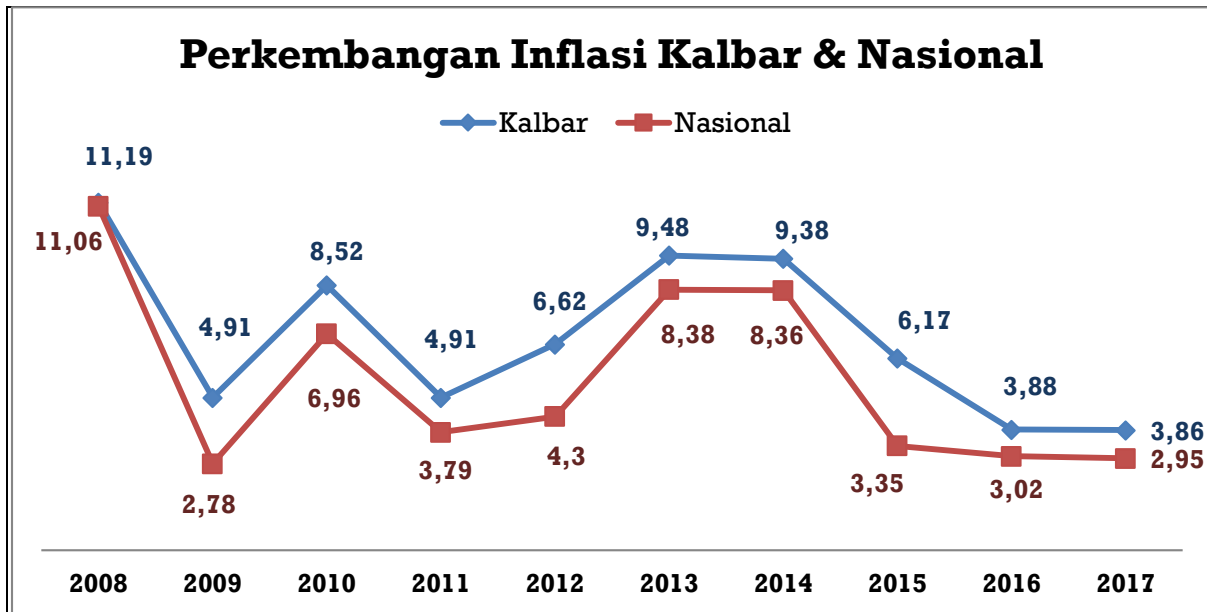
Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan pencapaian target tahunan 2015 – 2017 dan target 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 17 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN TARGET TAHUNAN SS 3 TAHUN 2015 – 2017 (SS3)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Realisasi			Target 2018
					2015	2016	2017	
					R	R	R	
1	2	3		4	5	6	7	8
3	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	3.1	Laju inflasi Kalimantan Barat	%	6,17	3,88	3,86	-
		3.2	Produk yang dipromosikan dalam negeri	Jenis	6	6	10	-
		3.3	Jumlah Gudang dengan sistem resi gudang	Unit	2	2	2	-
		3.4	Jumlah pasar tradisional yang dibina	Pasar	9	6	4	-
		3.5	Jumlah SIUP, TDP, dan TDG yang terdata	Perusahaan	11566	11591	7876	-
		3.6	Jumlah pengaduan Konsumen	Kasus	31	18	26	-
		3.7	Jumlah wajib tera/tera ulang	Orang	26807	13961	-	-
		3.8	Jumlah barang beredar yang diawasi	Jenis	10	12	20	-
		3.9	Jumlah BPSK yang terbentuk	Kab/ Kota	5	5	5	-
		3.10	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab Kemetrolgian	%	100	100	-	-
		3.11	Peningkatan Jumlah dan kompetensi SDM Kemetrolgian	Orang	17	10	-	-
		3.12	Jumlah Alat UTTP yang ditera / tera ulang	Unit	21572	19933	-	-
		3.13	Persentase Kecamatan yang dilayani	%	65,58	65,98	-	-

Laju Inflasi Kalimantan Barat, Laju inflasi Kalimantan Barat pada periode tahun 2017 sebesar 3.86% jauh dibawah target daerah sebesar 5.5%. Dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3.88 %, maka pencapaian tahun 2017 sedikit lebih baik, namun jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional tahun 2017 yang mencapai 2.95%. Jika dilihat dari komponen penyebab inflasi masih didominasi oleh bahan pangan dan pangan olahan.

Gambar 6 Perkembangan Inflasi Nasional dan Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2017



Sumber : BPS Pusat & BPS Kalbar, 2018. (data diolah)

Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat, Bank Indonesia, Asosiasi pedagang, KADIN, Bulog, Pelindo, Kepolisian, Pertamina dll. Beberapa kegiatan dinas perindag untuk mengantisipasi inflasi terutama pada waktu-waktu tertentu adalah :

Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan, merupakan kegiatan yang dirancang dan dimaksudkan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (pra sejahtera) pada saat menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Melalui kegiatan ini sekaligus merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam membantu dan menjaga daya beli masyarakatnya yang berpenghasilan rendah, sekaligus sebagai upaya untuk menekan dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Selain itu, dengan penyelenggaraan pasar murah diharapkan dapat menjaga lonjakan inflasi di daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Beberapa komoditi yang dijual pada kegiatan pasar murah merupakan bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, susu kental manis, sirup, mentega, tepung guladan kacang tanah. Selain itu juga pada beberapa lokasi beberapa komoditi lain yang diperlukan oleh masyarakat, seperti kacang atom, kacang medan, telur, dan beberapa barang kebutuhan masyarakat lainnya.

Kegiatan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dengan waktu dan tempat pelaksanaan, sebagai berikut :

- a. Pasar Murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H Tahun 2017, dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - Pasar murah di Kabupaten Ketapang, bertempat di Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017;
 - Pasar murah di Kabupaten Kubu Raya, bertempat di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017;
 - Pasar murah di Kabupaten Landak, bertempat di Desa Balai Peluntan Kecamatan Jelimpo pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017; dan
 - Pasar murah di Kabupaten Sanggau, bertempat di Desa Pulau Tayan Utara Kecamatan Tayan Hilir pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017.

- b. Pasar Murah dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - Pasar murah di Kabupaten Mempawah, bertempat di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2017; dan
 - Pasar murah di Kabupaten Landak, bertempat di Desa Rabak Kecamatan Sengah Temila pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2017;

Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis, kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan pemantauan sekaligus mengumpulkan/ memperoleh informasi dan data tentang kondisi stok (persediaan) barang kebutuhan pokok (sembako) dan barang strategis lainnya. Ketersediaan informasi dan data tentang stok tersebut sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang sehingga stabilitas harga barang-barang tersebut dapat terjaga. Selain itu dengan adanya informasi dan data mengenai ketersediaan stok bahan kebutuhan dan barang strategis lainnya akan menjadi salah satu bahan/dasar dalam menyusun/ mengambil kebijakan untuk menekan serta mencegah terjadinya lonjakan inflasi di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2017, pemantauan stok bahan kebutuhan pokok difokuskan pada beberapa komoditi, antara lain beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, susu kental manis, tepung terigu, kacang kedelai. Sedangkan untuk barang strategis lainnya yang dilakukan pemantauan stok adalah Semen.

Untuk memperoleh informasi dan data tentang stok sembako dan barang strategis lainnya dilakukan melalui kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dengan beberapa perusahaan/distributor yang ada di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, antara lain :

- Komoditi Beras : Perum BULOG Divre Kalbar; PD. Setia Jaya; PD. Era Jaya; CV. Salam Bahagia; PD.Mahkota Jaya; PD.Brantas; CV. Agro Abadi; PD. Kapuas Pratama; PD. Hakisa; CV. Taruna Jaya; PD. Sentosa Baru; CV. Kalimantan Jaya; CV. Khatulistiwa Jaya; PD. Tunas Baru; dan CV. Jaya Kota.
- Komoditi Gula : CV. Agro Abadi.
- Komoditi Minyak Goreng : PD. Kapuas Pratama; CV. Makmur Jaya; PT. Wilmar Cahaya Kalbar; PD. Hero; dan CV. Indo Prima.
- Komoditi Tepung Terigu : PT. Bogasari tbk; Indomarco.
- Komoditi Susu Kental Manis : CV. Bintang Laut; PT. Indomarco; PD. Surya Jaya.
- Komoditi Mentega : PT. Indomarco; dan Unilever.
- Komoditi Garam beryodium : PT. Heroes Adimulia; PT. Cipta Rasa Sejati; CV. Surya Indah; PD. Bintang Kapuas; CV. Sinar Borneo.
- Komoditi Daging Sapi : Rumah Potong Hewan.
- Komoditi Daging Ayam dan Telur Ayam : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dan Asosiasi Petelur Ayam.
- Komoditi Kacang Kedelai : CV. Kapuas Lestari.

Melalui kegiatan Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis juga dilaksanakan rapat/pertemuan dengan pelaku usaha dan *stakeholder* terkait guna membahas hal-hal yang terkait dengan kondisi ketersediaan, harga dan hal-hal lain yang terkait dengan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kalimantan Barat. Adapun rapat/pertemuan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, meliputi :

- a. Rapat membahas ketersediaan stok bahan pokok strategis dengan intansi terkait dan pelaku usaha (distributor bahan pokok) pada tanggal 20 Maret 2017 bertempat di ruang rapat Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Bimbingan Teknis Kebijakan Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan dan Hasil Pertanian Tahun 2017 oleh Direktorat Barang Pokok dan Barang Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada tanggal 12 April 2017 bertempat di Hotel Orchardz Gajah Mada Pontianak. Bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman para aparatur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait dan Pelaku Usaha dalam menerapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang barang pokok hasil peternakan dan pertanian.
- c. Rapat terpadu menghadapi Bulan Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438H pada tanggal 17 April 2017 bertempat di ruang rapat Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dengan peserta terdiri dari Instansi Terkait dan pelaku usaha (distributor bahan pokok).
- d. Rapat Koordinasi Identifikasi Bahan Pokok menjelang Puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1438H pada tanggal 27 April 2017 bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan. Rapat Koordinasi ini bermaksud untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga barang pokok dan barang penting serta diperlukan upaya dan

langkah-langkah untuk menjaga tidak terjadinya lonjakan harga khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

- e. Pelaksanaan Operasi Pasar Bawang Putih pada tanggal 30 Mei 2017 di Pasar Flamboyan dan Mawar sebanyak 60 (enam puluh) Ton dengan harga Rp.30.000,-/Kg untuk mengantisipasi kelangkaan bawang putih akibat cuaca buruk dan belum masa panen dari Negara Tiongkok/China sedangkan pasokan bawang putih yang ada tidak mencukupi sehingga menyebabkan harga bawang putih tidak stabil dan cenderung naik.

Selain melalui beberapa perusahaan/distributor yang ada di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, untuk mengetahui informasi dan data tentang kondisi stok yang ada pada wilayah kabupaten/kota lainnya, pada Tahun Anggaran 2017 juga dilaksanakan kegiatan Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis pada beberapa kabupaten di Kalimantan Barat, sebagai berikut :

- a. Kabupaten Sambas;

- Pada tanggal 29 s.d 31 Mei 2017, melakukan monitoring terhadap bahan pokok khususnya komoditi bawang putih yang mengalami kelangkaan sehingga menyebabkan harga bawang putih cenderung naik dan mencapai Rp.100.000,-/Kg. Hal ini dikarenakan stok bawang putih yang terdapat pada Distributor tidak layak untuk didistribusikan (kering dan busuk).
- Pada tanggal 21 s.d 23 Desember 2017, melakukan monitoring terhadap bahan pokok menjelang Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 dengan kondisi ketersediaan stok dan perkembangan harga bahan pokok cukup stabil.

- b. Kabupaten Ketapang;

- Pada tanggal 2 s.d 4 Juni 2017, melakukan monitoring terhadap bahan pokok khususnya komoditi bawang putih dengan perkembangan harga Rp.80.000,-/Kg dan cenderung menurun.
- Pada tanggal 10 s.d 12 Desember, melakukan monitoring terhadap bahan pokok menjelang Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 dengan kondisi ketersediaan stok dan perkembangan harga bahan pokok cukup stabil.

Dalam pelaksanaan monitoring tersebut, selain berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Urusan Perdagangan masing-masing) dan kunjungan ke pasar tradisional serta agen-agen di daerah, juga dilaksanakan kunjungan dan koordinasi dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KKOP) yang ada pada 2 (dua) kabupaten, yaitu KKOP Pelabuhan Sukabangun di Ketapang dan KKOP Pelabuhan Sintete di Sambas. Koordinasi dilakukan untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi terkait dengan pemantauan arus keluar masuk barang kebutuhan pokok dan barang strategis yang melalui kedua pelabuhan tersebut.

Produk yang dipromosikan dalam Negeri, yaitu melalui Kegiatan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi UMKM yang potensial di Kalimantan Barat dalam mempromosikan produk-produk yang dihasilkannya sehingga diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran yang akan berdampak pada semakin berkembangnya UMKM-UMKM potensial di Kalimantan Barat, seperti memberikan akses pasar dan promosi produk UKM unggul dalam menghasilkan produk berkualitas, bermutu, membangun merk sendiri, meningkatkan jejaring pemasaran antar peserta sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri secara regional maupun pasar global. Kegiatan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri dilaksanakan dengan ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan ***Pameran Produk Dalam Negeri Tingkat Regional I Tahun 2017*** yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), tanggal 27 September s.d 1 Oktober 2017, dan ***Pameran Produk Dalam Negeri Tingkat Regional II Tahun 2017*** yang dilaksanakan di Gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Hall 1, Tangerang Selatan (Banten), tanggal 11 s.d 15 Oktober 2017, dimana dalam penyelenggaraannya kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.

Pelaksanaan kegiatan pameran di Jakarta tersebut dilaksanakan bersamaan dengan HUT Dekranas Tahun 2017 serta hanya difokuskan pada Pameran Pangan dan Kuliner Khas Nusantara dengan tema “Promosi Produk Unggulan Daerah”. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan pameran tersebut terdiri dari 19 (sembilan belas) provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Sedangkan Pameran Produk Dalam Negeri Tingkat Regional II di Tangerang Selatan dilaksanakan bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Produk yang ditampilkan pada stand Provinsi Kalimantan Barat, antara lain :

1. Pada stand Pameran Produk Dalam Negeri Tingkat Regional I, meliputi :
 - minuman lidah buaya, dalam berbagai bentuk kemasan seperti *standing pouch*, botol dan kemasan balok;
 - aneka makanan/produk olahan dari lidah buaya, seperti dodol lidah buaya, teh lidah buaya, jelly lidah buaya, dan coklat lidah buaya;
 - keripik stick keladi
 - buah jeruk dan pepaya madu
 - aneka keripik/snack seperti keripik ikan bilis, keripik paru, keripik rempeyek, keripik jamur tiram dan keripik ikan salai

- beberapa produk makanan dari UKM industri lainnya.
 - Makanan kulliner khas Kalbar : bubur pedas
2. Pada stand Pameran Produk Dalam Negeri Tingkat Regional II, meliputi :
- minuman lidah buaya, dalam berbagai bentuk kemasan seperti *standing pouch*, botol dan kemasan balok;
 - aneka makanan/produk olahan dari lidah buaya, seperti dodol lidah buaya, teh lidah buaya, jelly lidah buaya, snack ikan tulang lidah buaya, stik keju lidah buaya, rempeyek lidah buaya, biskuit lidah buaya, nestum lidah buaya dan kerupuk lidah buaya
 - keripik stick keladi, amplang
 - buah jeruk
 - Makanan kuliner khas Kalbar : mie sagu dan pisang goreng
 - Produk-produk dari kabupaten/kota :
 - Kabupaten Mempawah : keripik pisang segedong, nastar nanas, snack bulu hantu, keripik tempe, sirup nanas, selai nanas, dodol nanas, kerupuk nanas, ikan bandeng presto, kue sagu dan lempok durian
 - Kabupaten Kapuas Hulu : berbagai jenis ikan sungai (lais, toman, belida dan biawan), beras kampung kapuas hulu dan madu hutan khas putussibau

Dalam kegiatan Pameran Produk Dalam Negeri Tingkat Regional I di Jakarta, pelaksanaan kegiatan Lomba Masak Makanan dan Minuman Khas Daerah yang biasanya diwakili oleh TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat **batal** dilaksanakan dikarenakan penghematan dana APBN Tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2017.

Dari pelaksanaan partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri Tingkat Regional II di Tangerang Selatan (Banten) Tahun 2017, sukses membukukan pembelian sebesar Rp 1,6 (satu koma enam) miliar secara keseluruhan dan menembuas pasar internasional. Menurut Direktur Pengguna dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Luther Palimbong, sinergi promosi kuliner dan pangan nusantara di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) memberi dampak penting sehingga produk kuliner banyak dibeli para *buyer* dari berbagai negara.

Dari keseluruhan pelaksanaan Pameran Produk Dalam Negeri Tingkat Regional I di Jakarta maupun Pameran Produk Dalam Negeri Tingkat Regional II di Tangerang Selatan yang telah diikuti, diketahui pula bahwa antusiasme para pengunjung terhadap produk-produk UMKM Kalimantan Barat sangat tinggi dan positif, baik terhadap produk pangan olahan dan terutama terhadap makanan tradisonal khas Kalimantan Barat yang sangat diminati oleh para pengunjung pameran.

Dari target 10 (sepuluh) jenis produk yang dipromosikan sudah teralisasi dalam pelaksanaan kedua pameran tersebut di atas, dengan beberapa persoalan yang dihadapi, antara lain :

- Adanya perubahan zonasi bagi peserta pameran tingkat regional I dan II, dimana sebelumnya dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2017, Kementerian Perdagangan menginformasikan bahwa Kalimantan Barat akan tergabung dalam Zonasi Regional I dengan lokasi pameran akan diselenggarakan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan berubah menjadi di Jakarta dan pelaksanaan pameran regional II yang semula di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menjadi di Tangerang Selatan, Banten.
- Hal ini menyebabkan perlu melakukan revisi pada target lokasi pameran yang telah ditetapkan di dalam DPA Tahun Anggaran 2017. Selain itu juga berpengaruh pada besaran biaya yang dibutuhkan, meskipun dalam pelaksanaannya telah dapat diatasi dan diselenggarakan sebagaimana mestinya
- Informasi pembatalan pelaksanaan kegiatan lomba masak makanan dan minuman khas daerah yang berdekatan dengan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat melakukan revisi DPA Tahun Anggaran 2017 yang mengakibatkan realisasi keuangan pada kegiatan tersebut tidak maksimal.

Jumlah gudang dengan sistem resi gudang, Pembinaan Resi Gudang yang dilakukan pada tahun 2017 adalah melalui Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan sistem resi gudang sehingga mampu menciptakan/memperkuat daya tawar-menawar petani sekaligus menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan secara spesifik kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para petani/kelompok tani, khususnya di wilayah Kabupaten Sambas, terkait dengan mekanisme dan tata cara penerapan Sistem Resi Gudang, termasuk manfaat yang akan diperoleh apabila menggunakan sistem resi gudang. Selain itu, dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperoleh informasi terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh para petani/kelompok tani dan para stakeholder terkait dengan belum berjalannya Sistem Resi Gudang, sekaligus untuk mencari solusi dan upaya yang perlu dilakukan guna percepatan pemanfaatan Gudang SRG di Kalimantan Barat.

Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan selama 1 (satu) hari efektif pada tanggal 28 April 2017 dengan mengambil tempat di Aula Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah (UP-IKM)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Sutan Syahrir No. 2 Pontianak. Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dengan dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari unsur Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, pengelola/calon pengelola gudang SRG di Kabupaten Sambas (Koperasi Mekar), stakeholder terkait seperti perbankan (BULOG, PT. Bank KALBAR, PT. Bank Rakyat Indonesia, dan PT. Bhandra Graha Reksa), serta instansi terkait lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seperti Biro Perekonomian Setda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang Tahun 2017 dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan sistem penyampaian materi dan diskusi/tanya jawab antara para narasumber dengan para peserta sosialisasi, yang dilakukan melalui 2 (dua) sesi, dimana sesi pertama diisi oleh narasumber dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI) Kementerian Perdagangan selaku Instansi Pembina Sistem Resi Gudang, yaitu Bapak **YULI EDI SUBAGIO, SE, MM** (Kepala Bagian Penguatan dan Pemberdayaan Sistem Resi Gudang pada Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan Pasar Lelang Komoditas BAPEPTI) dengan materi "**Kebijakan Pengembangan Sistem resi Gudang di Indonesia**".

Beberapa point penting yang disampaikan pada sesi pertama, antara lain :

1. Gambaran kondisi permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani di Indonesia serta alternatif solusi yang dapat diberikan
2. Definisi dan dasar hukum penerapan Sistem Resi Gudang
3. Hal-hal yang terkait dengan mekanisme penerapan sistem Resi Gudang, seperti :
 - Jenis barang yang dapat disimpan di gudang dengan SRG
 - Kelembagaan Sistem Resi Gudang
 - Alur Penerbitan Resi Gudang
 - Skema Subsidi Sistem Resi Gudang
 - Sistem Pengamanan dalam SRG
 - Manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak dan stakeholder yang terkait dalam penerapan sistem resi gudang
4. Dukungan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan Sistem Resi Gudang.

Selanjutnya pada sesi kedua diisi oleh narasumber dari Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai daerah yang telah memiliki dan mengoperasikan Gudang dengan Sistem Resi Gudang di Kalimantan Barat, dengan topik materi "**Implementasi, Hambatan dan Tantangan Penerapan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Sambas**", yang disampaikan oleh Ibu **NISA AZWARITA, SE** (Kepala Bidang Perdagangan Dinas

Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas). Melalui narasumber dimaksud diperoleh berbagai informasi yang terkait dengan pengalaman Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mempersiapkan dan mengoperasikan Gudang SRG yang telah dimiliki termasuk berbagai hal yang menjadi permasalahan dan tantangan serta langkah kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dengan demikian informasi yang disampaikan oleh narasumber dari Pemerintah Kabupaten Sambas tersebut dapat menjadi referensi atau gambaran bagi daerah lain yang akan membangun gudang SRG, khususnya Pemerintah Kabupaten Landak yang telah memiliki gudang dengan sistem resi gudang namun masih belum dapat beroperasi.

Beberapa point penting yang disampaikan oleh narasumber dari Pemerintah Kabupaten Sambas, antara lain :

1. Gambaran situasi dan kondisi gudang dengan Sistem Resi Gudang yang ada di Kabupaten Sambas
2. Gambaran kegiatan dan proses dalam rangka pembangunan gudang, penyiapan sarana prasarana pendukung, serta penerapan sistem resi gudang di Kabupaten Sambas
3. Berbagai permasalahan dan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menerapkan sistem resi gudang
4. Gambaran potensi dan besaran biaya penyimpanan barang pada gudang SRG di Kabupaten Sambas
5. Contoh Resi Sistem Resi Gudang yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas

Secara keseluruhan, dari hasil paparan dua sesi tersebut, mendapatkan respon dan perhatian yang cukup baik dari para peserta, dimana antusiasme peserta untuk menggali informasi dan wawasan yang lebih luas cukup tinggi, yang terlihat dari diskusi dan tanya jawab yang diajukan oleh para peserta dengan narasumber. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa para peserta cukup tertarik untuk mendukung percepatan penerapan sistem resi gudang di Kalimantan Barat, khususnya dari pihak perbankan yaitu Bank KALBAR dan BRI, yang menunjukkan ketertarikannya untuk membantu implementasi sistem resi gudang.

Dari hasil kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang Tahun 2017 tersebut juga dihasilkan kesepahaman bahwa kegiatan yang bersifat penyuluhan atau diseminasi informasi mengenai sistem resi gudang harus lebih ditingkatkan, terutama kepada masyarakat petani, guna memberikan kesadaran bagi mereka agar tidak selalu terjebak pada tengkulak-tengkulak yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi para petani itu sendiri.

Jumlah Pasar Tradisional yang dibina, Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Pasar Tradisional merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang *up to date* mengenai kondisi dan perkembangan sarana distribusi perdagangan (seperti pasar tradisional, pasar modern dan gudang) serta untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam mengajukan permohonan bantuan pembiayaan untuk pembangunan maupun revitalisasi/renovasi pasar tradisional kepada Pemerintah Pusat sekaligus melakukan pemantauan/monitoring perkembangan pemanfaatan alokasi DAK dan Tugas Pembantuan bidang sarana perdagangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Monitoring dan Pembinaan Pasar Tradisional Tahun Anggaran 2017, antara lain:

- a. Melaksanakan monitoring dan pembinaan pasar tradisional pada 4 (empat) kabupaten/kota, sebagai berikut :
 - Monitoring dan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Sanggau, tanggal 10 s.d 12 Juli 2017;
 - Monitoring dan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Ketapang, tanggal 14 s.d 16 September 2017;
 - Monitoring dan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Sintang, tanggal 18 s.d 20 September 2017;
 - Monitoring dan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 6 s.d 8 Desember 2017;
- b. Memfasilitasi penerbitan rekomendasi untuk mendukung permohonan bantuan kepada pemerintah pusat dalam rangka pembangunan pasar tradisional/pasar rakyat dan pembangunan sarana kemetrolagian pada beberapa kabupaten/kota, yaitu :
 - Rekomendasi Pembangunan Pasar Rakyat Pasar Tengah di Kota Pontianak;
 - Rekomendasi Pembangunan Pasar Rakyat Seluas di Kabupaten Bengkayang;
 - Rekomendasi Pembangunan Pasar Rakyat Semi Modern di Kota Singkawang;
 - Rekomendasi Pembangunan Pasar Rakyat Benua Garantukng di Kota Singkawang;
 - Rekomendasi Pembangunan Pasar Rakyat Sungai Ana di Kabupaten Sintang;
 - Rekomendasi Pembangunan Pasar Rakyat Jarai di Kabupaten Sanggau.
- c. Melaksanakan rekapitulasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan inventarisasi/pemantauan terhadap perkembangan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdaganganyang telah diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota;
 - 1). Kota Singkawang, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp.1.428.094.000,-;
 - 2). Kabupaten Kubu Raya, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp. 2.098.747.000,-;

- 3). Kabupaten Mempawah, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp. 1.626.070.000,- ;
 - 4). Kabupaten Landak, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp.987.054.000,-;
 - 5). Kabupaten Bengkayang, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp.815.014.000,-;
 - 6). Kabupaten Sanggau, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp. 2.134.935.000,-;
 - 7). Kabupaten Sekadau, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp. 3.637.562.000,-;
 - 8). Kabupaten Sintang, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp. 949.074.000,- ;
 - 9). Kabupaten Sambas, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp. 2.489.672.000,-;
 - 10). Kabupaten Kapuas Hulu, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp. 2.645.989.000,-;
 - 11). Kabupaten Kayong Utara, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp. 1.461.030.000,-;
 - 12). Kabupaten Ketapang, menerima alokasi DAK sub bidang pasar sebesar Rp. 4.284.821.000,-;
- d. Selain pengembangan sarana perdagangan melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), pada Tahun Anggaran 2017 beberapa pemerintah kabupaten/kota juga memperoleh bantuan untuk pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui mekanisme Tugas Pembantuan dari Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dengan rincian sebagai berikut :
- 1). Kabupaten Sintang, menerima Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.6.000.000.000,- dialokasikan untuk Pasar Rakyat Alai;
 - 2). Kabupaten Sanggau, menerima Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.6.000.000.000,- dialokasikan kembali untuk Pasar Rakyat Jarai;
 - 3). Kota Singkawang, menerima Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.6.000.000.000,- dialokasikan kembali untuk Pasar Rakyat Benua Garantukng;
 - 4). Kabupaten Bengkayang, menerima Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.6.000.000.000,- dialokasikan kembali untuk Pasar Rakyat Seluas.
- e. Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, hanya 12 kabupaten/kota yang menerima alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan TA. 2017, sedangkan 2 (dua) kabupaten yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Melawi tidak memperoleh alokasi DAK dimaksud. Selain itu terdapat 4 Kabupaten yang mendapatkan alokasi TP yaitu Kab. Sintang, Sanggau, Bengkayang dan Kota Singkawang.

- f. Melaksanakan pengelolaan terhadap pelaporan dana alokasi khusus secara *online* menggunakan aplikasi e-Monitoring DAK yang diakses melalui portal <http://dak.kemendag.go.id>.

Beberapa informasi yang diperoleh melalui pelaksanaan monitoring dan pembinaan pasar tradisional pada beberapa pemerintah kabupaten, antara lain :

- a. Rekapitulasi Data Sarana Perdagangan di Provinsi Kalimantan Barat yang telah terdata sampai dengan September 2017, sebagai berikut :
- Jumlah Hypermart, sebanyak 4 buah;
 - Jumlah Mal/Plaza, sebanyak 8 buah;
 - Jumlah Pasar Grosir (Modern), sebanyak 1 buah;
 - Jumlah Pasar Swalayan (Modern), sebanyak 442 buah;
 - Jumlah Pasar Tradisional, sebanyak 352 buah;
 - Jumlah Gudang, sebanyak 685 orang.
- b. Beberapa pemerintah daerah belum memiliki data yang lengkap mengenai kondisi pasar tradisional, pasar modern, maupun sarana gudang yang ada di wilayahnya. Bahkan masih terdapat daerah yang belum memiliki data gudang di wilayahnya;
- c. Pemerintah Kabupaten Landak sampai dengan saat ini masih belum memberikan izin untuk pembangunan pasar retail modern, seperti Indomaret dan Alfamart;
- d. Guna meningkatkan produktivitas sarana perdagangan, baik pasar tradisional/pasar rakyat, gudang non SRG maupun gudang SRG untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, pemerintah terus mendorong pembangunan sarana perdagangan agar sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal pemenuhan sarana prasarana pokok yang harus dimiliki. Selanjutnya dalam mendukung dan membantu pemerintah daerah dalam membangun sarana perdagangan yang berkualitas, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menyediakan dana alokasi khusus maupun dana tugas pembantuan bidang sarana perdagangan, yang secara khusus diperuntukan bagi pembangunan ataupun revitalisasi sarana perdagangan di daerah, dimana khusus untuk implementasi program pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat terus didorong pada tersedianya pasar tradisional yang bersih, sehat, aman dan nyaman;
- e. Sebagai upaya untuk terus menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan, maka Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan kebijakan baru terkait sarana pergudangan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, yang menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dimana salah satu pokok perubahannya adalah pengaturan mengenai klasifikasi gudang yang lebih tegas dan jelas karena telah mengakomodir ketentuan mengenai klasifikasi gudang

terbuka maupun gudang tertutup, termasuk indikator klasifikasi yang diperjelas dengan kriteria luas dan indikator volume.

Jumlah SIUP, TDP dan TDG yang terdata, yaitu melalui Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang *up to date* terkait pendaftaran perusahaan dan perkembangan kegiatan usaha melalui penerbitan SIUP dan TDG, yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sekaligus memperoleh informasi dan masukan terkait dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penerbitan SIUP maupun TDG sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi dan pemahaman dalam memaknai maksud dan tujuan setiap pendataan SIUP, TDP dan TDG bagi perkembangan dunia usaha di daerah, khususnya di Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi dan hasil pengumpulan data yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa secara umum pelaksanaan penerbitan SIUP, TDP maupun TDG pada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat telah dilimpahkan/dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan perizinan/pelayanan terpadu, baik yang berdiri sendiri dalam bentuk Kantor Pelayanan Perizinan maupun yang menjadi bagian dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dengan adanya pelimpahan tersebut semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk memperoleh perizinan yang diperlukan. Namun demikian, di sisi lain juga muncul persoalan baru yang terkait dengan masih kurangnya koordinasi antara unit/instansi yang menerbitkan SIUP, TDP dan TDG dengan instansi yang mengurus perdagangan pada kabupaten/kota (selaku instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembuatan SIUP dan TDP). Hal ini terlihat dari belum semua instansi teknis (Dinas Urusan Perdagangan) yang ada di daerah yang memiliki serta dapat menyampaikan data/laporan secara rutin kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dikarenakan tidak lancarnya input laporan dari instansi penerbit.

Dari hasil pengolahan data yang berhasil dihimpun/tercatat sepanjang Tahun 2017, dapat dibuat sebuah rekapitulasi sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), secara keseluruhan yang dilaporkan berjumlah 2.843 perusahaan, dengan rincian :
 - SIUP Perusahaan Mikro, sebanyak 415 perusahaan;
 - SIUP Perusahaan Kecil, sebanyak 1.909 perusahaan;
 - SIUP Perusahaan Menengah, sebanyak 435 perusahaan;
 - SIUP Perusahaan Besar, sebanyak 84 perusahaan.
2. Penerbitan Daftar Ulang/Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), berjumlah 1.077 perusahaan, dengan rincian :
 - SIUP Perusahaan Mikro, sebanyak 46 perusahaan;

- SIUP Perusahaan Kecil, sebanyak 790 perusahaan;
 - SIUP Perusahaan Menengah, sebanyak 792 perusahaan;
 - SIUP Perusahaan Besar, sebanyak 49 perusahaan.
3. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang tidak aktif Nihil (tidak ada laporan);
 4. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), secara keseluruhan yang dilaporkan berjumlah 2.902 perusahaan, dengan rincian :
 - Bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), sebanyak 618 perusahaan;
 - Bentuk usaha Koperasi, sebanyak 51 perusahaan;
 - Bentuk usaha Persekutuan Komanditer (CV), sebanyak 1.010 perusahaan;
 - Bentuk usaha Perseorangan (PO), sebanyak 1.174 perusahaan;
 - Bentuk Perusahaan Lain (PD), sebanyak 49 perusahaan;
 5. Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), secara keseluruhan berjumlah 1.054 perusahaan, dengan rincian :
 - Bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), sebanyak 224 perusahaan;
 - Bentuk usaha Koperasi, sebanyak 23 perusahaan;
 - Bentuk usaha Persekutuan Komanditer (CV), sebanyak 392 perusahaan;
 - Bentuk usaha Perseorangan (PO), sebanyak 398 perusahaan;
 - Bentuk Perusahaan Lain (PD), sebanyak 17 perusahaan.
 6. Tanda Daftar Gudang (TDG) yang dilaporkan terbit pada tahun 2017 Nihil (tidak ada laporan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota).

Barang Beredar yang diawasi, Kegiatan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Pengawasan barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh Tim Operasional dan Tim Terpadu di pasar tradisional dan pasar modern. Pengawasan dimaksud dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian atau pemenuhan terhadap persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), label, serta mengawasi produk yang tidak layak konsumsi, misalnya dalam bentuk kemasan yang sudah rusak ataupun kadaluarsa. Selain pengawasan terhadap barang yang diperjualbelikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan pembinaan kepada para pedagang/pelaku usaha dengan memberikan masukan sekaligus informasi mengenai barang-barang yang layak dan tidak layak untuk dijual sehingga kepentingan konsumen dan produsen sama-sama terlindungi. Kegiatan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat dilakukan melalui pengawasan secara kasat mata yang dilaksanakan secara berkala maupun sewaktu-waktu, yaitu pada hari-hari biasa dan saat menyambut hari besar keagamaan. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan

pembelian sampel barang/produk untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.

Kegiatan pengawasan tersebut mengakomodir 20 (dua puluh) produk yang telah ditetapkan dalam SI wajib. Produk-produk tersebut antara lain Kipas angin, Kabel, Terminal, Box Cable, Fitting, Stop Contact, Sochet, Saklar, Melamin, Setrika, Ban Motor, Mainan Anak, Kabel Gas, Regulator, Lampu Swabalas, Besi Tulang Beton, Kloset, Semen, Keramik, Seng. Adapun pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 19 April 2017 dan 15 s.d 16 Desember 2017;
- b. Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 April 2017 dan 18 s.d 19 Desember 2017;
- c. Kota Singkawang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 27 April 2017 dan pada tanggal 12 s.d 14 Juni 2017;
- d. Kabupaten Sambas dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 27 Mei 2017 dan 15 s.d 17 Oktober 2017;
- e. Kabupaten Sanggau dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 31 Mei 2017 dan 26 s.d 28 Oktober 2017;
- f. Kabupaten Sintang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Agustus 2017 dan 31 Oktober s.d 1 November 2017;
- g. Kabupaten Melawi dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Agustus 2017;
- h. Kabupaten Bengkayang dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 31 Agustus 2017;
- i. Kabupaten Mempawah dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 September 2017 dan 9 s.d 11 November 2017;
- j. Kabupaten Landak dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 Oktober 2017;
- k. Kabupaten Sekadau dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 Oktober 2017 dan 5 s.d 7 November 2017;
- l. Kabupaten Ketapang dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 31 Oktober 2017;
- m. Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan pada tanggal 29 November s.d 1 Desember 2017;
- n. Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2017;

Selain melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen melalui aplikasi Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS-PK) yang dijalankan secara online.

Monitoring dan Pengawasan Barang-barang dalam Pengawasan, Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang dalam Pengawasan Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan untuk menjaga ketertiban perdagangan barang-barang yang penting untuk kehidupan perekonomian, khususnya terhadap beberapa barang/ produk yang telah ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan seperti gula, minuman beralkohol, bahan berbahaya dan pupuk bersubsidi. Kegiatan ini merupakan bentuk dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dari barang-barang yang beredar di masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang dalam Pengawasan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang-Barang Dalam Pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan Pengarah Gubernur Kalimantan Barat serta dibantu oleh Tenaga Ahli yang terdiri dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, termasuk instansi POLDA Kalimantan Barat, Ditjen Bea dan Cukai, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak;
- b. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Terpadu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 di Ruang Rapat OP ROOM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Peserta rapat yang hadir adalah Biro Perekonomian dan Pembangunan Sosial Setda Prov. Kalbar, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar, Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Prov. Kalbar, Reskrimsus Polda Kabar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak, Kanwil IX Dirjen Bea dan Cukai Pontianak, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak dalam rangka membahas Persiapan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang-barang Dalam Pengawasan secara Terpadu di Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 s.d 17 November 2017 untuk mengawasi peredaran minuman dan beralkohol di Minimarket dan Toko Pengecer sesuai dengan Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 serta peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional sesuai dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014.
- c. Melaksanakan koordinasi sekaligus monitoring dan pengawasan barang-barang dalam pengawasan pada beberapa daerah kabupaten, yaitu :
 - Pengawasan internal oleh Tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada yaitu Kabupaten Sambas pada tanggal 29 s.d 31 Mei 2017. Informasi dan temuan yang dihasilkan pada saat pengawasan tersebut menjadi salah satu pokok bahasan yang dibahas dalam rapat Tim Terpadu;

Pengawasan Barang – Barang Dalam Pengawasan dilakukan terhadap (MINOL) Minuman Beralkohol yang dijual di minimarket dan toko pengecer untuk mencegah adanya kegiatan memproduksi, menjual dan membeli, mengedarkan, meminum serta menyimpan minuman beralkohol khususnya anak-anak muda dapat terlindungi moral serta menjauhkan dari dampak negatif alkohol dan (B2) Bahan Berbahaya yang dijual bebas tanpa didukung oleh kelengkapan perizinan usaha agar tidak disalahgunakan sebagai bahan pengawet terhadap makanan maupun pangan segar.

- Pengawasan secara terpadu dengan melibatkan Anggota Tim Terpadu, antara lain dari POLDA Kalimantan Barat, BBPOM Pontianak, Bea dan Cukai dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Pengawasan terpadu tersebut dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 20 s.d 22 Juni 2017 dan Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 s.d 17 November 2017;
- d. Melakukan pengawasan terhadap Minuman Beralkohol pada beberapa Minimarket dan Toko Pengecer di wilayah Kota Pontianak dengan tujuan untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ataupun izin legalitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada tanggal 31 November 2017 yang dilaksanakan di Jalan Purnama dan Jalan Prof. M. Yamin dimana pengawasan tersebut melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Jumlah Pengaduan konsumen, Jumlah BPSK yang terbentuk, dilakukan melalui Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membentuk dan menumbuh kembangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berperan dalam penyelesaian sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen dilingkup pemerintah kabupaten/kota. Sampai dengan Tahun 2017, di Provinsi Kalimantan Barat telah terbentuk 5 (lima) BPSK kabupaten/kota beserta Sekretariatnya, yaitu :

- a. BPSK Kota Pontianak, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK tanggal 17 Agustus 2010;
- b. BPSK Kota Singkawang, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK tanggal 17 Agustus 2010;
- c. BPSK Kabupaten Ketapang, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan BPSK tanggal 10 Mei 2011;
- d. BPSK Kabupaten Bengkayang, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan BPSK tanggal 24 Januari 2014;
- e. BPSK Kabupaten Kubu Raya, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pembentukan BPSK tanggal 10 Mei 2014.

Pada tahun 2017 tercatat 2 (dua) BPSK yang telah habis masa berlakunya sehingga tidak dapat memberikan pelayanan terhadap konsumen yaitu BPSK Singkawang (telah habis masa berlaku sejak Desember 2016) dan BPSK Ketapang Singkawang (telah habis masa berlaku sejak Juli 2017). Untuk itu pada tahun 2018 akan dilakukan seleksi dan pengangkatan anggota BPSK pada BPSK yang telah habis masa berlakunya.

Sebagai upaya pembinaan terhadap BPSK yang telah terbentuk tersebut, pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan kegiatan monitoring/kunjungan kerja dan koordinasi ke BPSK tersebut untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSK dalam melaksanakan perlindungan konsumen serta hambatan dan kendala yang mungkin ditemui sekaligus untuk mengetahui permasalahan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Selanjutnya terhadap Kabupaten yang belum membentuk BPSK, maka melalui kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen ini didorong dan difasilitasi untuk segera membentuk BPSK. Dan sampai dengan akhir Tahun 2017, terdapat 3 (tiga) BPSK yang telah ditetapkan Keputusan Presiden tentang pembentukannya, namun untuk operasionalnya masih menunggu Pembentukan Keanggotaan Sekretariatnya, yaitu :

- a. BPSK Kabupaten Pontianak, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan BPSK tanggal 12 Juli 2013;
- b. BPSK Kabupaten Kapuas Hulu, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan BPSK tanggal 21 Juli 2014;
- c. BPSK Kabupaten Sintang, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selain melaksanakan pembinaan secara langsung kepada BPSK di Kabupaten/Kota, melalui kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Tahun Anggaran 2017, juga dilakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Koordinasi dan konsultasi tersebut secara khusus dilaksanakan untuk membahas peralihan kewenangan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana berdasarkan undang-undang tersebut, sub urusan perlindungan konsumen sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka terhitung sejak 2 Oktober 2016 segala kegiatan yang terkait dengan perlindungan konsumen tidak lagi menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota, termasuk pengangkatan, pemberhentian, pembinaan serta pembiayaan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten/kota. Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan masih mempersiapkan peraturan-peraturan yang akan mengatur tentang mekanisme serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan perlindungan konsumen oleh Pemerintah Provinsi.

Dengan target sebanyak 60 kasus pada tahun 2017, Jumlah pengaduan konsumen pada tahun 2017 sebanyak 26 kasus pengaduan dan telah ditidakanjuti yang terbagi pada 4 BPSK yaitu :

- BPSK KKR : 5 Kasus;
- BPSK Pontianak : 12 Kasus;
- BPSK Bengkayang : 7 Kasus; dan
- BPSK Ketapang : 2 Kasus.

Sedikitnya jumlah pengaduan pada BPSK dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Dilihat dari sedikitnya pengajuan merupakan hasil yang positif yang mencerminkan berjalannya perlindungan konsumen dengan baik di Kabupaten/Kota. Namun disisi lain juga patut dipertanyakan apakah sedikitnya jumlah pengajuan tersebut menggambarkan kurangnya informasi bagi masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. Hal tersebut masih perlu dicermati agar dapat diperbaiki kedepannya sehingga memberikan keamanan bagi masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen, pada tahun 2017 juga telah dilaksanakan Kegiatan Konsumen Cerdas (KONCER) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017 bertempat diruang pertemuan gedung Kantor Bupati Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini diikuti oleh Aparatur Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat di Kab. Sanggau dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait produk-produk yang tidak layak konsumsi.

Jumlah Wajib Tera/tera ulang, Berdasarkan UU 23 tahun 2014 kewenangan urusan kemetrolgian sudah **dialihkan** ke Pemerintah kabupaten/kota.

Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan lab kemetrolgian, Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Kemetrolgian, Berdasarkan UU 23 tahun 2014 kewenangan urusan kemetrolgian sudah **dialihkan** ke Pemerintah kabupaten/kota.

Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang dan persentase kecamatan yang dilayani, Berdasarkan UU 23 tahun 2014 kewenangan urusan kemetrolgian sudah **dialihkan** ke Pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan perubahan/revisi Rencana Strategis Dinas Perindag Prov. Kalbar 2013 – 2018, untuk Sasaran Strategis 3 (SS3) “Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Yang Didukung Dengan Pengamanan Perdagangan Daerah” di tahun 2018 menjadi Sasaran Strategis 2 (SS2).

- **Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis**

Tidak tercapainya target Jumlah BPSK yang terbentuk disebabkan oleh tidak dapat dilaksanakannya Pembentukan BPSK di Kab/Kota melalui Keputusan Presiden. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perekrutan anggota dan sekretariat BPSK yang baru maupun BPSK yang telah habis masa berlakunya. Peralihan kewenangan dari Kab/Kota menjadi kewenangan Provinsi juga mengharuskan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk perekrutan anggota dan sekretariat BPSK serta operasional BPSK di Kab/Kota.

- **Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

Upaya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 yaitu segera melaksanakan seleksi anggota dan sekretariat BPSK serta melaksanakan pengangkatan pada BPSK yang baru terbentuk maupun yang telah habis masa berlakunya. Sedangkan untuk operasional BPSK sedang diupayakan agar dapat dianggarkan pada APBD Prov. Kalbar melalui mekanisme sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

A.4 Peningkatan Ekspor Daerah Dan Pengendalian Impor (SS4)

TABEL 18 CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR (SS4)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017	REALISASI	% (6/5)X100
1	2	3	4	5	6
4	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	4.1 Neraca Perdagangan	US\$ 200 Juta	US\$ 558,23 Juta	279,12
		4.2 Kerjasama Ekonomi regional	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		4.3 Jumlah eksportir baru	10 Unit Usaha	27 Unit Usaha	270,00
		4.4 Jumlah Kontak dagang	10 Kali	18 Kali	180,00
		4.5 Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ 675 Juta	US\$ 827,30 Juta	122,56
		4.6 Pelayanan Dokumen Ekspor Impor Secara Online	1.900 Dokumen	3.715 Dokumen	195,53
		4.7 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab. Pengujian dan Kalibrasi sertifikasi mutu barang	9 Ruang Lingkup	11 Ruang Lingkup	122,22

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017	REALISASI	% (6/5)X100
1	2	3	4	5	6
		4.8 Jumlah SDM fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya	2 Orang	3 Orang	150,00
		4.9 Jumlah pengujian mutu produk	220 Sample	885 Sample	402,27
		4.10 Jumlah kalibrasi alat lab	350 Alat	861 Alat	246,00
RERATA CAPAIAN KINERJA SS 4					

Terdapat 10 (sepuluh) indikator pada sasaran strategis Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengendalian Impor dimana pada tahun 2017 rata-rata pencapaiannya mencapai 206,77%. Hal tersebut disebabkan beberapa hal antara lain semakin meningkatnya kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar dibandingkan tahun sebelumnya, serta semakin dikenalnya Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindag Prov.

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

TABEL 19 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengendalian Impor	Pengembangan Ekspor	451.656.000	429.663.800	95,13	206,77	110,59
	Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri	1.568.344.000	1.524.808.600	97,22		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,18% (rata-rata antara realisasi dua program) dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 206,77%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 110,59.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan terbesar pada capaian indikator Jumlah pengujian mutu produk dan Jumlah kalibrasi alat lab. Hal tersebut dikarenakan semakin dikenalnya Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang sebagai salah satu tempat yang dapat melaksanakan sertifikasi barang serta kalibrasi yang telah terakreditasi KAN. Hal tersebut menyebabkan terjadi peningkatan yang signifikan pada kedua indikator tersebut.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

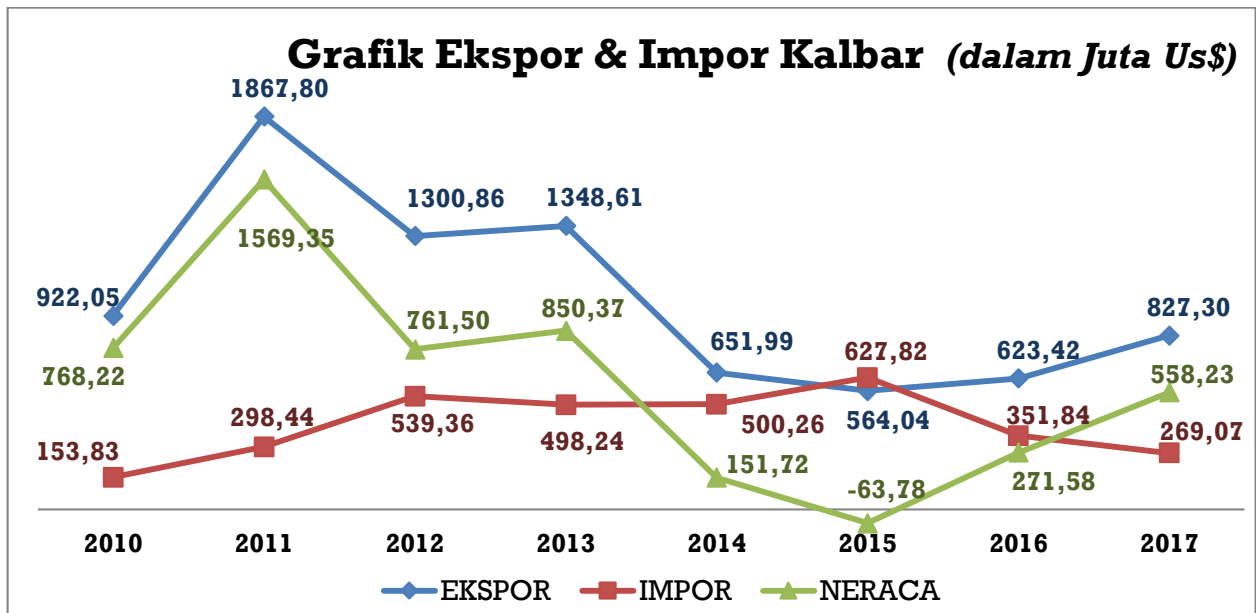
TABEL 20 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN TARGET TAHUNAN 2015 – 2017 (SS4)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Realisasi			Target
					2015	2016	2017	2018
					R	R	R	
1	2	3		4	5	6	7	8
4	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	4.1	Neraca Perdagangan	US\$ Juta	68,45	271,58	517,55	225
		4.2	Kerjasama Ekonomi regional	Dokumen	1	1	1	1
		4.3	Jumlah eksportir baru	Unit Usaha	11	17	27	15
		4.4	Jumlah Kontak dagang	Kali	5	9	18	10
		4.5	Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ Juta	565,97	623,42	759,29	700
		4.6	Pelayanan Dokumen Ekspor Impor Secara Online	Dokumen	2135	2884	3.715	2.000
		4.7	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab. Pengujian dan Kalibrasi sertifikasi mutu barang	Ruang Lingkup	9	9	11	-
		4.8	Jumlah SDM fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	10	6	3	-
		4.9	Jumlah pengujian mutu produk	Sample	356	291	885	240
		4.10	Jumlah kalibrasi alat lab	Alat	562	615	861	450

Neraca Perdagangan, Neraca perdagangan daerah sampai dengan tahun 2011 menunjukkan trend yang meningkat tajam, namun sejak tahun 2012 menurun akibat pembatasan ekspor bahan tambang sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mulai mengalami kontraksi yang cukup

kuat hingga puncaknya pada tahun 2015 pertama kali dalam sejarah terjadi defisit neraca perdagangan Kalbar . Namun demikian, hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena peningkatan importasi Kalimantan Barat lebih disebabkan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang investasi sawit dan pengolahan alumina. Peningkatan neraca perdagangan Kalbar Tahun 2017 mencapai 105,55% apabila dibandingkan dengan Tahun 2016.

GAMBAR 7 PERKEMBANGAN NERACA PERDAGANGAN KALBAR 2010-2017



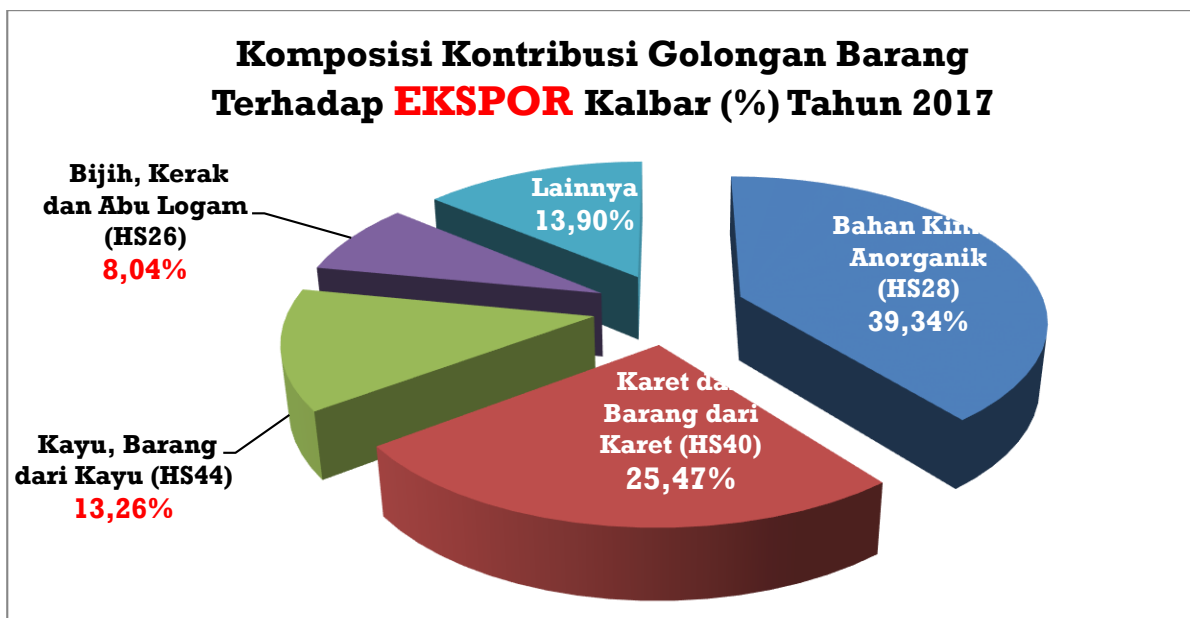
Sumber: BPS Kalbar, 2018. (data diolah)

Nilai Ekspor Kalimantan Barat, mulai Pada Tahun 2017, nilai ekspor pada HS 28 untuk Bahan Kimia Anorganik (salah satunya HS 29.18 Korundum artifisial tertentu maupun tidak; aluminium oksida; aluminium hidroksida) sebesar US\$ 325,47 juta yang naik hampir 300% apabila dibandingkan dengan nilai ekspor Tahun 2016 yang sebesar US\$ 126,78 juta. Selain itu, terdapat peningkatan nilai ekspor pada HS 26 untuk Biji, kerak dan abu logam (salah satunya HS 26.20 Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja), mengandung arsenik, logam atau senyawanya) dari pada Tahun 2017 sebesar US\$ 66,51 juta yang naik hampir 3.500% bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada Tahun 2016 yang sebesar US\$ 1,95 juta. Kenaikan nilai ekspor tersebut dipengaruhi oleh kebijakan peningkatan ekspor pertambangan pada tahun 2017 seperti terbitnya PP No. 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan keluar negeri dalam jumlah tertentu, Permen ESDM No 5/2017 yang menjelaskan salah satunya tentang Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan keluar negeri paling lama 5 tahun sejak tanggal

berlakunya permen ESDM no. 5/2017 setelah melakukan perubahan bentuk pengusahaannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan Permendag No.1/2017 yang menjelaskan bahwa Ekspor tambang hanya dapat dilakukan setelah Memenuhi batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian, Verifikasi di pelabuhan muat dan/atau, Persetujuan ekspor setelah mempertimbangkan rekomendasi dari kementerian ESDM, masa Berlaku ekspor produk pertambangan hasil pengolahan (lampiran II) diperpanjang s/d 11 Januari 2022.

Kebijakan terkait ekspor mineral tambang pada tahun 2017 memberikan dorongan bagi peningkatan nilai ekspor Kalbar pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016. Diprediksikan bahwa peningkatan nilai ekspor Kalbar pada 2018 tidak akan berbeda jauh dengan nilai ekspor pada tahun 2017 karena kebijakan ekspor terkait bahan tambang pada 2018 dianggap masih mengacu pada kebijakan ekspor pada Tahun 2017.

GAMBAR 8 KOMPOSISI KONTRIBUSI EKSPOR KALBAR 2017



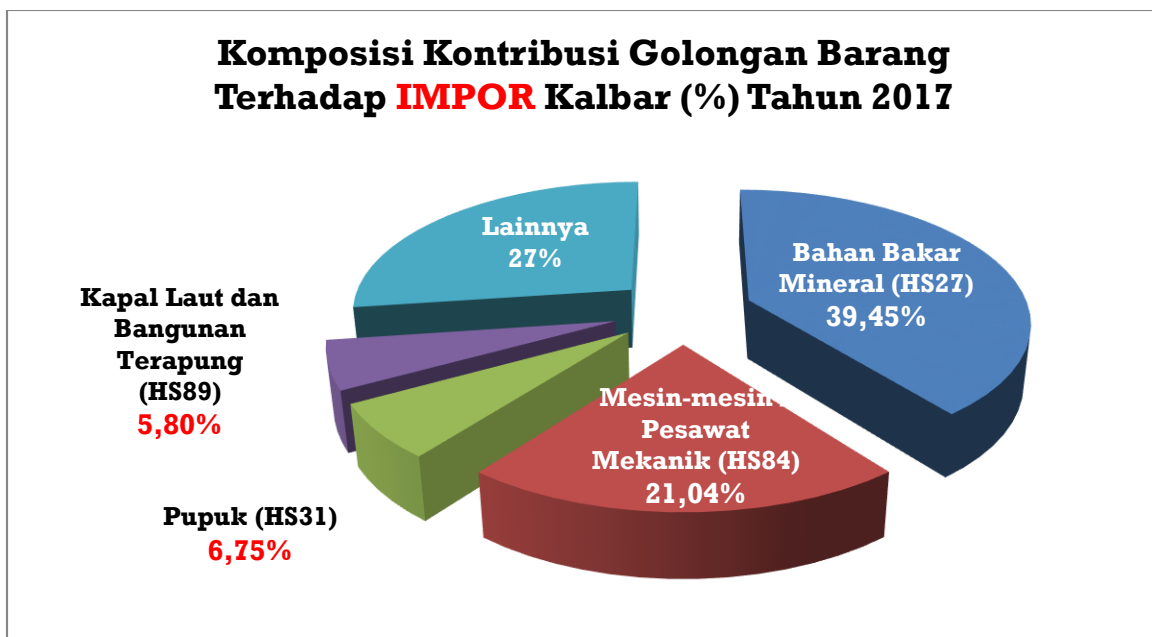
Sumber : BPS Kalbar, 2018. (data diolah)

Selain kebijakan dalam negeri yang mendorong peningkatan ekspor Kalbar, harga komoditi dunia pada 2017 yang cenderung naik bila dibandingkan dengan tahun 2016 seperti harga CPO, Karet, Aluminium serta minyak kelapa juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai ekspor Kalbar. Bahkan harga aluminium dunia berdasarkan data dari World Bank meningkat hampir 130% yang pada 2017 berada di atas US\$ 2000 /mt. Walaupun harga komoditi dunia cenderung naik pada 2017, terdapat komoditi ekspor unggulan Kalbar yang mengalami penurunan nilai ekspor karena adanya

penurunan volume ekspor komoditi tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2016. Melihat dari kebijakan ekspor pertambangan pada 2017, Kalbar masih dapat meningkatkan nilai ekspornya akan tetapi relaksasi kebijakan ekspor ini seharusnya tidak membuat Kalbar hanya terfokus pada ekspor mineral tambang yang masih setengah mentah dan dapat mengolah lebih lanjut produk tersebut menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi (meningkatkan manufaktur produk tersebut lebih tinggi).

Sebagai perbandingan, Cina pada 2017 mulai membatasi ekspor alumina karena adanya kebijakan pengurangan polusi udara yang diantaranya disebabkan oleh aktivitas industri smelter sehingga terjadi penurunan suplai alumina dipasaran dunia yang menyebabkan permintaan alumina meningkat di pasaran dunia. Kedepannya, Kalbar akan dihadapkan dengan permasalahan lingkungan yang sama sehingga diharapkan Kalbar dapat merencanakan pengolahan lebih lanjut dari alumina.

GAMBAR 9 KOMPOSISI KONTRIBUSI IMPOR KALBAR 2017



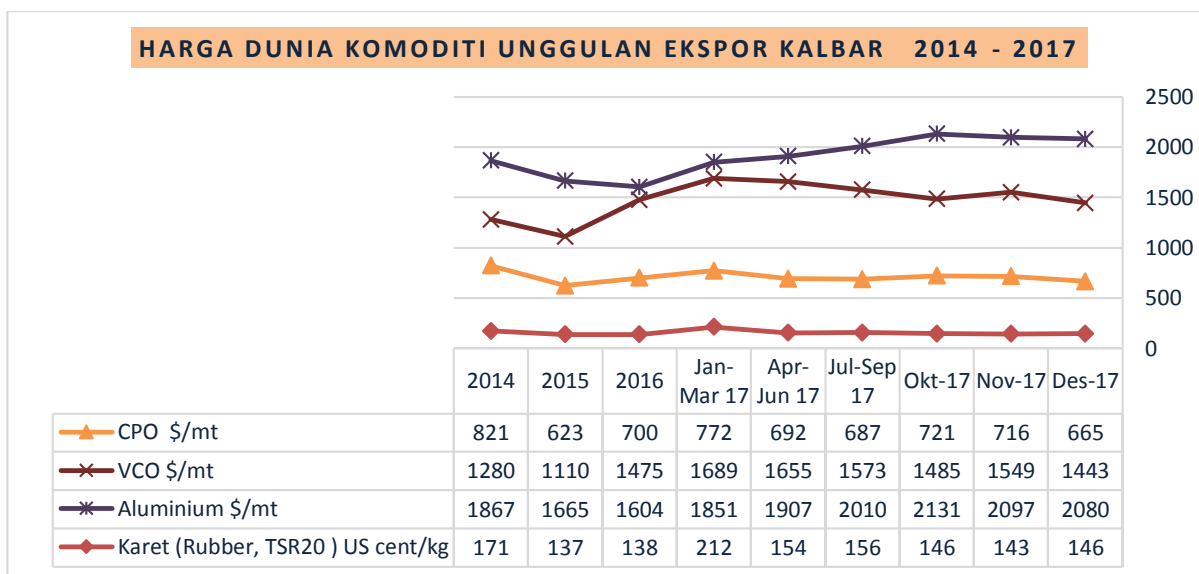
Sumber : BPS Kalbar, 2018. (data diolah)

Walaupun Kinerja ekspor yang menunjukkan tren positif mulai 2016 sampai dengan 2017, nilai impor Kalbar pada Tahun 2017 menurun bila dibandingkan dengan Tahun 2016 (BPS Kalbar, 2018) terutama pada HS 84 impor mesin-mesin/pesawat mekanik yang turun. Penurunan impor barang modal atau mesin-mesin menunjukkan bahwa industri yang menggunakan barang modal tersebut telah mempunyai mesin yang memadai untuk melakukan produksi. Kenaikan impor mesin ini mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2016 yang merupakan dampak dari investasi pada smelter bauksit di kabupaten Ketapang dan Sanggau. Hasil dari belanja mesin tersebut berpengaruh pada nilai ekspor Kalbar pada tahun 2017 yang meningkat terutama dari

ekspor bahan kimia anorganik (HS 28). Walaupun terjadi penurunan pada nilai impor mesin-mesin/pesawat mekanik, kontribusinya masih tetap tinggi pada seluruh nilai impor Kalbar sedangkan kontribusi tertinggi yaitu pada impor bahan bakar mineral (HS 27). Tingginya konsumsi bahan bakar mineral di Kalbar yang terlihat dari meningkatnya impor bahan bakar mineral salah satunya mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan konsumsi bahan bakar untuk permesinan produksi.

Penurunan impor barang modal perlu diwaspadai sebagai indikasi akan terjadinya penurunan realisasi investasi di Kalimantan Barat. Karena selama ini tingginya nilai importasi Kalbar tidak perlu dikhawatirkan karena mendukung investasi dan atau hilirisasi komoditi utama Kalbar yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja ekspor Kalbar kedepan. Hal ini sudah dibuktikan dengan semakin tingginya ekspor bahan kimia (berupa alumina) dan CPO.

GAMBAR 10 PERKEMBANGAN HARGA KOMODITI UNGGULAN KALBAR DI DUNIA TAHUN 2014-2017



Sumber : *Pinksheet, World Bank, 2018.*

Kerjasama Ekonomi Regional, Kegiatan yang rutin diikuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar sebagai bagian dari delegasi Pemprov. Kalbar. Kerjasama yang dimaksud berada dalam skema Sosek Malindo, kerja sama dua negara Indonesia dan Malaysia. Pertemuan tersebut menghasilkan 1 (satu) dokumen kertas kerja bentuk-bentuk kerjasama antar Kalbar dan Sarawak yang akan dibawa ke tingkat Pusat/kerajaan. Kendala dalam mengikuti kegiatan tersebut lebih dipengaruhi pada aspek penganggaran. Jadwal yang kerap kali berubah, terkadang menyulitkan pencairan anggaran untuk pembiayaan keikutsertaan tersebut. Permasalahan dalam

kerjasama Sosekmalindo ini adalah (1) Dari usulan dan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kertas kerja II khususnya Tim Teknis Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan Kalbar Sarawak dalam implementasinya mengalami hambatan terhadap regulasi dan payung hukum di perbatasan yang belum mempunyai persepsi yang sama antar instansi terkait; (2) Pemerintah pusat juga terlalu lama dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan perekonomian di wilayah perbatasan sedangkan perkembangan di perbatasan telah mengalami perubahan baik bidang ekonomi, sosial dan budaya; (3) Kesepakatan pembangunan Dry Port/Inland Port dan infrastruktur penunjang di Pos-pos PPLB terutama terutama di PPLB Entikong belum sesuai, sedangkan pihak Sarawak (Tebedu Inland Port) telah selesai sehingga pengoerasian sepihak saja belum dapat dilaksanakan, karena perlu SOP bersama. Untuk itu perlu upaya-upaya mendorong Pemerintah untuk segera melengkapi pembangunan Pos lintas Batas Negara dengan Sarana Prasarana penunjang pergerakan orang dan manusia yang berstandar internasional dan regulasi yang mengaturnya yang sesuai dengan perkembangan saat ini dan kedepan, sehingga ada kepastian hukum dalam aktivitas ekonominya, termasuk upaya-upaya Pemerintah daerah maupun pemerintah diharapkan merencanakan dan mengkoordinasikan secara terpadu tentang kawasan industri yang mempunyai outlet atau pintu-pintu keluar (ekspor) di PPLB-PPLB di perbatasan Kalbar

Jumlah Eksportir Baru dan Pelayanan Dokumen Ekspor-impor, Target untuk kedua IKU tersebut masing-masing secara berurutan adalah 10 eksportir dan 1900 dokumen. Dengan realisasi sebanyak 27 eksportir atau unit usaha dan 3.715 Dokumen Ekspor Impordengan rincian 3.666 Dokumen SKAdan 49 Dokumen API yang telah diterbitkan selama kurun waktu tahun 2017.

Kemudahan dalam mengajukan perizinan ekspor dengan menggunakan aplikasi online dan pelatihan serta fasilitasi bagi pelaku usaha di Kalbar untuk menjadi eksportir akan sangat menunjang upaya daerah menumbuh kembangkan eksportir baru terutama UKM. Pada tahun 2017 tercatat 27 Eksportir baru yang terdaftar di Kalimantan Barat, yaitu :

TABEL 21 EKSPORTIR BARU TAHUN 2017

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nama Pengguna	Tanggal Daftar	Status
1	ALMITRA SETIA JAYA	Jl Raya Wajok Hulu Km 10,07, Rt 002, Rw 011	M. RULLY SETIAWAN, SH	08/12/2017	Aktif
2	SETIA COCONUT INDONESIA	Jl. Raya Kaliasin Luar, Rt 022, Rw 004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan	ASIH SETYANINGSIH	06/12/2017	Aktif

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nama Pengguna	Tanggal Daftar	Status
3	UNICOCO INDUSTRIES INDONESIA	Jl Raya Pontianak Singkawang Dusun Mandala, Rt 001, Rw 001	UNICOCO	06/12/2017	Aktif
4	INDO PALM ENTERPRISE	Jl. Pahlawan Dusun Banjar Laut (Depan Bangunan Walet) Rt 024, Rw 010 Desa Rasau Jaya li Kec. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat – Indonesia	FELICIA VERONICA	30/11/2017	Aktif
5	KALBAR BUMI PERKASA	Jl Tanjung Raya li Komp Graha Zaujati I, Nomor A 12, Rt 007, Rw 006	PO, SUWANDI	29/11/2017	Aktif
6	IMPIMA INTERNATIONAL	Jl Putri Daranante, Nomor 88 D, Rt 005, Rw 014	LETDY	21/11/2017	Aktif
7	MANDIRI JASA NUSANTARA	Jl Puspowarno Vii/ 6, Rt 009, Rw 003	ADI PERMANA	08/11/2017	Aktif
8	GEMA SUPRA ABADI	Graha Anugerah, Jl. Raya Pasar Minggu No.17a, Pancoran	Adit Tri Wiguno	16/10/2017	Aktif
9	YAN JONATHAN / UD MERYAN INDO BORNEO	Jl. Veteran Blok B-2a	Yan Jonathan	03/10/2017	Aktif
11	HASIL ALAM SUMBER ABADI	Jl Tanjung Pura, Nomor 91-C, Rt 003, Rw 015	Supriati	22/09/2017	Aktif
12	BANDAR INDO VIETNAM FISHERY	Desa Sajenu Sawit Pulau Teluk Air Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya	PT. BANDAR INDO VIETNAM FISHERY	19/08/2017	Aktif
13	XINHAIYUAN INDONESIA FISHERY	Jl. Pramuka Nipah Kuning, Uppp Sungai Rengas, Lorong 3, Rt 001, Rw 011 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya	PT. XINHAIYUAN INDONESIA FISHERY	19/08/2017	Aktif
14	BANDAR BAHARI BORNEO	Sungai Sejenuh	PT. BANDAR BAHARI BORNEO	19/08/2017	Aktif
15	DELAPAN DELAPAN BERJAYA	Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Gerbang Permata Asri, Nomor H-10, Rt 006, Rw 016	DELAPAN DELAPAN BERJAYA	08/08/2017	Aktif
16	PUTRA AGRO DINAMIS	Jl. Imam Bonjol, Nomor 525, Rt 001, Rw 020	Putra Agro Dinamis	02/08/2017	Aktif
17	BORNEO CAKRA BUANA	Jl. Adisucipto Gg. Swadaya I, Nomor 3, Rt 001, Rw 022	TRIAS SEPTIANI NURANDINI	01/08/2017	Aktif

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nama Pengguna	Tanggal Daftar	Status
18	ROYAL MEHAR COMPANY	Jl. Hm Suwignyo Gg. Sidomukti, Nomor 28-A, Rt 002, Rw 017	ENGIE NAZILLA	24/07/2017	Aktif
19	SATU TUJUAN UTAMA	Dusun li	ABDUL HAKIM AZIS HUTAGAOL	10/06/2017	Aktif
20	PENITI SUNGAI PURUN	Jl. Jend. A Yani No. 26, Panjunan	WELLY	17/05/2017	Aktif
21	HASIL SUMBER ALAM RESOURCES	Jl Putri Candramidi Gg Sapta Jaya, Nomor 19 B, Rt 001, Rw 009	EDI	05/05/2017	Aktif
22	PT. MULTI PERKASA SEJAHTERA	Jl. Ks. Tubun No.34 Akcaya Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat 78121	PT. MULTI PERKASA SEJAHTERA	26/04/2017	Aktif
23	REZEKI PRIMA ENERGI	Jl Trans Kalimantan Km 15 Dusun Karya li, Nomor -, Rt 002, Rw 001	HENDRY HALIM	25/04/2017	Aktif
24	DARISTO CEMERLANG	Dusun Pinang Baru	LILY BRATA	26/03/2017	Aktif
25	RIMBA KELAPA MAKMUR	Jl. Raya Peniti Luar Km. 26,8, Rt 00, Rw 00	LUKITO JAYADI LO	01/03/2017	Aktif
26	PD. TIRTA KAPUAS	Dusun Sei Ayak Iii Desa Sei Ayak Iii Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau	AKET	20/02/2017	Aktif
27	CV. CAHAYA MANDIRI	Dusun Dangku Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau	KACUS	16/02/2017	Aktif

Diharapkan dengan semakin banyaknya pelaku eksportir Kalbar akan meningkatkan diversifikasi produk dan tujuan pasar ekspor Kalbar yang akhirnya meningkatkan nilai ekspor Kalbar secara keseluruhan.

Jumlah Kontak Dagang, dengan target sebesar 9 kontak dagang, realisasi pada tahun 2016 sebanyak 17 kontak dagang, sedangkan pada tahun 2017 dari target 10 kontak dagang, berhasil terjadi kontak dagang sebanyak 18 perusahaan. Perusahaan yang berhasil difasilitasi melakukan kontak dagang adalah :

**TABEL 22 PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KONTAK DAGANG DAN KOMODITI
YANG DIMINATI**

NO	NAMA	NAMA PERUSAHAAN YG MELAKUKAN KONTAK	KOMODITI YANG DIMINATI	NAMA PERUSAHAAN KALBAR
1.	AZHARI OSMAN	MESTI MAKMUR SDN BHD (SARAWAK – MALAYSIA) NO. TELP : 08565021 EMAIL: mesti_makmur@yahoo.com	plywood	PT.Erna Djulawati
2.	AGUS HASANUDIN, ST	TOPI BAMBUCOM NO. HP: 081905042927 EMAIL : topibambu@gmail.com	Kerajinan Kulit kayu Kapuak	JJJ.Kapuak Craft
3.	H. TAUFIQ RAHMAN, MBA	BAMBOO STUDIOS NO HP : 082217006756 EMAIL : headoffice@citrabarubusana.com	Kerajinan Anyaman Bambu	Dekranasda Prov Kalbar
4.	DANIELLE LIPANG LAWAI	RABEN BEADS ACCESSORIES (SARAWAK – MALAYSIA) NO TELP : +60168144495 +60168144496	Accesoris Manik	Kerajinan Manik Dari Kapuas Hulu Ibu Susana
5.	DARMAWANSA SAID MASHUR	D'ONE HABIB TRDING NURSYUHADAH (SABAH – MALAYSIA) NO. TELP : 0148501109 EMAIL : darmawansadone@gmail.com	Rubber	PT.Star Rubber
6.	H. TAUFIQ RAHMAH, MBA	ASOSIASI PENGRAJIN ALAS KAKI INDONESIA NO TELP : 022 7335644 NO HP : 085352507100 EMAIL : headoffice@apai-indonesia.org	Kerjasama Kerajinan bambu	Dekranasda Prov Kalbar
7.	NUR RAHMAN RANONG ABDULLAH	RA & NONG CREATION (MALAYSIA) NO HP : +60198740621 EMAIL : ranongperu@gmail.com	Accesoris Manik Manik	Kerajinan Kapuas Hulu Iban Milik Ibu Susana
8.	MALIK FADJIAR	M.R.F CONSULTANCY (KUCHING – SARAWAK) NO. HP : +60137337120 EMAIL : malfadj@gmail.com		
9.	ABID BASHARAT	VISION IMPEX GENERAL TR. LLC (UNI EMIRATE ARAB) NO HP : +97144427092 EMAIL : abid@visionimpex.org	Plywood	PT.erna Djulawati

NO	NAMA	NAMA PERUSAHAAN YG MELAKUKAN KONTAK	KOMODITI YANG DIMINATI	NAMA PERUSAHAAN KALBAR
10.	CARLA VILLA	IVSA DA (ARGENTINA) NO HP : +542317422917 EMAIL : admivsada@gmail.com	Kayu Ulin	Borneo Kawan Kita
11.	JAN DE BOCK	SBW ENERGY GMBH (JERMAN) HO HP : 081222777958 EMAIL : jdbeckj@gmail.com	Rubber	Pak wenndy dari mempawah
12.	RIA ASSAF	PT. DEWELL LOGISTIK INDONESIA NO TELP : 0216343750 NO HP : 087720812105 EMAIL : ria.assaf@ina.de-well.com	Rubber	
13.	GAMIL ABDOULRAHIM ALI	AL GAMIL GROUP (REPUBIK DJIBOUTI) NO TELP : +2321356659 EMAIL : gamil.ak@algamil.net	Batu Pemata zudika diamond	Mr. Bumi
14.	NISAR AHMAD	RUMI TRADING LLC (KABUL – AFGANISTAN) NO TELP : +93 784516129	Plywood	PT.Erna Djuliwati
15.	ARMANDO T. SANSO	MCC CONSORTIUM (FILIPINA) NO HP : +639177097739 EMAIL : mccp@yahoo.com	Lidah buaya	Isun Vera
16.	ANDREI MALAKHAU	TECHNONICOL NO HP : 087886970403 EMAIL: andrei.tnicol@gmail.com	Bauksit	PT. Antam
17.	JONATHAN D. HENRIQUES NAVARRO	HOUSE OF INDONESIA (SPANYOL) NO HP : +34616666795 EMAIL: housefindonesiapain@yahoo.com	Telanan kayu	PT.Borneo Kawan Kita Milik Pak Cahyadi Singkawang
18.	ISKANDAR TANUWIJAYA	INACHAM CHAMBER (BEIJING – CHINA) NO Hp : +8613397728888 EMAIL : tbstbs03@gmail.com	Anyaman Bambu	Dekranasda

Sebenarnya jumlah perusahaan yang terfasilitasi melakukan kontak dagang lebih banyak, namun terkendala pada pelaporan Perusahaan yang mengupdate jumlah kontak dagang terutama yang terjadi pada saat maupun setelah pameran yang difasilitasi Dinas Perindag Provinsi. Selain itu yang perlu menjadi perhatian kedepan adalah bagaimana mendukung dan mendampingi para pelaku UKM untuk merealisasikan kontak dagang menjadi kontrak dagang. Untuk itu diperlukan upaya-

upaya pembinaan intensif dan pembangunan trading house yang dapat membantu para pelaku UKM kita mencari pasar, membantu korespondensi dengan calon buyer, membantu membuat kontrak hingga membantu masalah perizinan ekspor.

Pemeliharaan dan peningkatan Kemampuan Lab. Pengujian dan Kalibrasi Sertifikasi Mutu Barang, di tahun 2017 Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang telah menambah ruang lingkup menjadi 11 ruang lingkup dengan tambahan ruang lingkup pengujian minyak goreng sawit dan minyak kelapa. Dari target yang telah ditetapkan UPSMB telah merealisasikan 11 ruang lingkup dari 9 target ruang lingkup yang telah ditetapkan. UPSMB telah berhasil melakukan promosi yang cukup gencar, sehingga berhasil meningkatkan kepercayaan pelanggan (eksportir) untuk mengujikan produknya dan mengkalibrasi alat labnya di Lab UPSMB. Terlebih lagi UPSMB ini telah melakukan networking dengan lab-lab besar di pusat seperti lab balai dan balai besar dibawah Kemenperind dan Kemendag.

Jumlah SDM Fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya, pada tahun 2017 telah dapat ditingkatkan kompetensinya sebanyak 3 (tiga) orang dari target awal sebanyak 2 (dua) orang.

Jumlah pengujian mutu produk dan jumlah kalibrasi alat lab, Pada tahun 2017 Jumlah pengujian mutu produk sebanyak 885 contoh dari target 220 contoh. Dibanding pada tahun 2016, dari target sebanyak 192 contoh uji telah terealisasi sebanyak 291 contoh uji. Di tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah pengujian mutu produk yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan oleh usaha promosi dan jalinan kerjasama yang baik dari UPSMB dan pelaku usaha/pengusaha terkait dengan pengujian mutu produknya.

Selanjutnya, Jumlah pelayanan kalibrasi alat customer pada tahun 2017 sebanyak 861 alat dari target 350 alat. Jika dibandingkan tahun 2016 sebanyak 615 alat dari target sebanyak 300 alat, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah kalibrasi alat yang diuji disebabkan oleh keberhasilan UPSMB memelihara ruang lingkup akreditasi lab pengujian dan lab kalibrasi dan didukung dengan adanya promosi pada customer baik secara langsung maupun tidak langsung dan pada kegiatan formal dan informal, capaian target ini juga didukung dari kegiatan pengujian mutu produk wajib SNI dan monitoring produk unggulan Kalbar. Diharapkan dukungan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas UPSMB Provinsi Kalbar dimana telah menjadi salah satu bidang kewenangan provinsi pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terlebih lagi dalam rangka implementasi MEA 2015 yang sudah berlaku per 1 Januari 2016.

Berdasarkan perubahan/revisi Rencana Strategis Dinas Perindag Prov. Kalbar 2013 – 2018, untuk Sasaran Strategis 4 (SS4) “Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengendalian Impor” di tahun 2018 menjadi Sasaran Strategis 3 (SS3).

- **Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis**

Kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis ini yaitu tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar. Namun hal tersebut tidak dapat hanya diatasi oleh Dinas Perindag saja. Dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar.

- **Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Kalbar. Diharapkan dengan adanya forum tersebut dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar. Selanjutnya juga dilaksanakan konsultasi dengan Kementerian terkait dengan kewenangan yang ada pada Kementerian terkait dengan usulan perubahan peraturan dan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan PLBN di Kalbar.

A.5. Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal Dan Internal Organisasi (SS5)

TABEL 23 CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN EKSTERNAL DAN INTERNAL ORGANISASI (SS5)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017	REALISASI	% (6/5)X100
1	2	3	4	5	6
5	PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN EKSTERNAL DAN INTERNAL ORGANISASI	5.1 Operasional pelayanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
		5.2 Jumlah dokumen perencanaan indag Kalbar	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		5.3 Data spasial indag Kalbar	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100
		5.4 Peningkatan SDM aparatur indag	15 Orang	17 Orang	113,33

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2017	REALISASI	% (6/5)X100
1	2	3	4	5	6
		5.5 Jumlah forum sinergi pengembangan indag	1 Forum	1 Forum	100
RERATA CAPAIAN KINERJA SS 5					102,67

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi merupakan bentuk dukungan oleh sekretariat terhadap organisasi dimana indikator yang ada mayoritas adalah indikator pelayanan wajib oleh OPD.

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

TABEL 24 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi	Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan	2.985.260.000	2.797.156.727	93,70	102,67	8,97

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93,70% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 102,67%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 8,97.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian berbagai indikator merupakan bentuk dukungan penuh terhadap internal organisasi dalam memfasilitasi dari sisi peningkatan SDM, penyusunan dokumen kerja, serta operasional perkantoran lainnya. Selain itu, juga terdapat indikator dalam penyiapan peta spasial sebagai data awal dalam perencanaan pengembangan industri dan perdagangan berbasis spasial yang juga sebagai langkah dalam mendukung simpul jaringan data spasial Provinsi Kalimantan Barat.

TABEL 25 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN TARGET TAHUNAN 2015 – 2017 (SS5)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Realisasi			Target 2018
					2015	2016	2017	
					R	R	R	
1	2	3		4	5	6	7	8
5	PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN EKSTERNAL DAN INTERNAL ORGANISASI	5.1	Operasional pelayanan Kantor	Bulan	12	12	12	12
		5.2	Jumlah dokumen perencanaan indag Kalbar	Dokumen	2	2	2	2
		5.3	Data spasial indag Kalbar	Kab/Kota	3	-	2	-
		5.4	Peningkatan SDM aparatur indag	Orang	52	6	17	20
		5.5	Jumlah forum sinergi pengembangan indag	Forum	1	1	1	1

Operasional Pelayanan Kantor, dukungan IKU di atas dimaksudkan untuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mendukung pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan di Kalimantan Barat. Program-program dilaksanakan oleh Sekretariat untuk menjamin lancarnya kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalimantan Barat. IKU ini didukung program-program rutin perkantoran, dimana selama tahun 2017 operasional pelayanan kantor berjalan secara lancar, yang dapat dibuktikan dengan pencapaian IKU lainnya secara baik.

Jumlah Dokumen Perencanaan Indag Kalbar, Dokumen perencanaan bagi instansi Pemerintah termasuk Dinas Perindag Prov. Kalbar memiliki fungsi yang sangat vital. Dokumen dimaksud bukan lagi sekedar untuk pengklasifikasikan mata kegiatan dan anggaran, tetapi juga memiliki legalitas sebagai dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dengan demikian, dukungan terhadap penyusunan dokumen-dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perindag Prov. Kalbar menyusun dua jenis Dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Data Spasial Indag Kalbar, Hasil kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung simpul jaringan data spasial Provinsi Kalimantan Barat juga menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi pengembangan kawasan industri serta sistem logistik daerah. Pada tahun 2017 Dinas Perindag Prov. Kalbar telah menyelesaikan pembuatan data spasial yang melingkupi wilayah dua kabupaten yaitu Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang, rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi terkait dengan rencana pelaksanaan penyusunan data spasial indag di Kab. Kayong Utara pada tanggal 24 s.d 26 Agustus 2017

- Koordinasi terkait dengan rencana pelaksanaan penyusunan data spasial indag di Kab. Ketapang pada tanggal 29 s.d 31 Agustus 2017
- Survey pendahuluan di Kab. Kayong Utara pada tanggal 14 s.d 16 September 2017
- Survey lokasi di kab. Kayong Utara pada tanggal 3 s.d 5 Oktober 2017
- Survey lokasi di Kab. Ketapang pada tanggal 18 s.d 20 Oktober 2017

Hingga tahun 2017 telah tersusun data spasial dari 8 Kabupaten (yaitu Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara) dari 14 Kab/kota yang ditargetkan selesai pada tahun 2020. Data dimaksud tersedia dalam bentuk file dan peta tercetak yang didisplay di Kantor Dinas Perindag Prov. Kalbar. Saat ini data yang berhasil dihimpun baru meliputi data kawasan industri dan sarana perdagangan termasuk gudang. Ke depannya data ini akan terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kapasitas SDM Dinas Perindag Prov. Kalbar terkait teknik pemetaan. Untuk itu perlu dukungan penganggaran untuk percepatan pemetaan spasial Kab/kota, dimana saat ini telah diwajibkan untuk membuat peta spasial masing-masing sesuai tuis yang akan diolah menjadi *one map policy*.

Peningkatan SDM aparatur indag, Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat 17 (tujuh belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) baik yang diselenggarakan di dalam kota maupun luar kota.

Jumlah Forum sinergi pengembangan Indag, Forum sinergi pengembangan Indag yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Rapat Kerja Indag (yang juga berlaku sebagai Forum SKPD bidang Indag se-Kalbar dalam rangka menyusun Renja 2018) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2017 s.d 1 Maret 2017 bertempat di Hotel Gajahmada Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari instansi Pemerintah, baik horisontal maupun vertikal, dunia usaha, akademisi, kelompok masyarakat, serta perwakilan lembaga legislatif daerah. Kegiatan dimaksudkan untuk menghimpun masukan terkait dengan pengembangan urusan industri dan perdagangan di Kalimantan Barat. Hasil dari forum tersebut juga menjadi masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perindag Prov. Kalbar (Renja SKPD).

Berdasarkan perubahan/revisi Rencana Strategis Dinas Perindag Prov. Kalbar 2013 – 2018, untuk Sasaran Strategis 5 (SS5) “Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal” di tahun 2018 ditiadakan. Hal tersebut didasari oleh hasil konsultasi dengan Biro Organisasi yang menyatakan bahwa indikator rutin agar tidak dimasukkan menjadi indikator dinas dan cukup menjadi indikator eselon III.

- **Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dtrategis ini yaitu belum tervalidasinya data industri dan perdagangan yang didapat melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota. Hal tersebut menyebabkan masih perlunya validasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan serta dikembangkan.

- **Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya mendorong agar bidang dan melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota dapat memvalidasi data-data sesuai dengan kewenangan yang ada sehingga peta spasial tersebut dapat dijadikan bahan dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan kedepannya.

A.6. Pencapaian Target IKU Pemprov Kalbar 2017

Sedangkan untuk capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Pemprov Kalbar TA 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 26 CAPAIAN TARGET IKU PEMPROV KALBAR 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017 DALAM RPJMD PROV KALBAR	REALISASI	%
8.	Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah Ekspor Sektor Perdagangan (US\$)	US\$ 2.075,07 Juta	827,3 Juta USD (Tahun 2017) 623,42 Juta USD (Tahun 2016)	39,87
		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	1,142	Rp. 1,608 juta/bulan (Tahun 2017) Rp. 1,489 juta/bulan (Tahun 2016)	140,81
		Produktivitas Total Daerah	18,07	Rp. 49,63 juta/tahun* (Tahun 2017) Rp. 49,47 juta/tahun* (Tahun 2016)	274,65
		Nilai Tukar Petani	102,87	97,89 Poin (Tahun 2017) 97,15 Poin (Tahun 2016)	95,16

Sumber : BPS Kalbar, 2018. (data diolah)

Keterangan : *) Terjadi perubahan perhitungan PDRB per 2015 dari 9 sektor menjadi 17 Kategori dan Tahun Dasar Statistik dari tahun 2000 menjadi tahun 2010.

Sasaran strategis: MENINGKATKAN KETAHANANAN NERACA PERDAGANGAN YANG DIDUKUNG EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

(sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar hanya berkompeten membahas “Jumlah Ekspor Sektor Perdagangan”).

IKU : Jumlah ekspor sektor perdagangan (US\$):

- Nilai ekspor Kalimantan Barat tahun 2017 mencapai **USD 827,30 Juta**, jauh di bawah target RPJMD sebesar **USD 2.075,07Juta** atau hanya terealisasi sebesar **36,59 %**.

Penyebab turunnya ekspor ini disebabkan penurunan nilai ekspor komoditi utama Kalbar seperti karet, kayu dan CPO, yaitu sebagai akibat dari **lesunya perekonomian dunia**. Namun disisi lain nilai ekspor membaik dengan peningkatan kontribusi golongan barang Bahan Kimia Anorganik (HS28) dan Biji, Kerak dan Abu Logam (HS26).

Peningkatan signifikan terjadi pada golongan **barang Biji, Kerak dan Abu Logam (HS26)** dimana perubahan Tahun 2017 terhadap periode yang sama Tahun 2016 mencapai lebih dari **3.000%**. Hal tersebut merupakan Keuntungan sekaligus Ancaman bagi struktur ekspor Kalbar secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kontribusi golongan barang Biji, Kerak dan Abu Logam (HS26) dapat mendongkrak nilai ekspor kalbar secara signifikan. Namun hal tersebut juga merupakan ancaman bagi industri hilirisasi Kalbar yang disebabkan kecenderungan Eksportir lebih mudah untuk mengekspor bahan mentah tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Disisi lain dengan meningkatnya volume ekspor akan mengurangi ketersediaan bahan baku tambang di Kalbar secara signifikan.

Selanjutnya, sebagai langkah untuk lebih meningkatkan kinerja ekspor daerah, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya intervensi harga pasar produk pertanian atau perkebunan sejak beberapa tahun terakhir, antara lain melalui (1) Pelayanan peningkatan daya saing komoditi, (2) pameran/promosi dagang dan peningkatan informasi ekspor, dan (3) Hilirisasi komoditi utama daerah.

- **Intervensi pertama melalui pelayanan peningkatan daya saing komoditi**, terutama dilakukan dengan meningkatkan pelayanan ekspor-impor melalui e-SKA (surat keterangan asal / certificate of origin) dan API online (angka pengenal impor).memfasilitasi pengujian standar mutu komoditi utama Kalbar terutama karet dan sawit oleh laboratorium yang telah terakreditasi pada Unit Pegawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindag Prov. Kalbar.
- **Intervensi selanjutnya melalui pameran/promosi dagang baik di tingkat regional, nasional dan internasional** dimaksudkan menjadi sarana upaya daerah untuk memperluas tujuan pasar (diversifikasi pasar) dan memperluas jenis komoditi yang dipasarkan (diversifikasi komoditi) sehingga diharapkan Kalbar tidak hanya tergantung pada pasar Negara-negara tertentu atau daerah tertentu. Beberapa kegiatan promosi tetap yang diikuti tingkat dunia adalah Pameran Produk Ekspor atau yang dikenal dengan Trade Expo Indonesia (TEI). Diharapkan perluasan tujuan pasar ini akan mendongkrak demand komoditi daerah sehingga meningkatkan harga komoditi tersebut di tingkat petani. Dan

juga dilakukan **upaya-upaya peningkatan informasi ekspor** dimana diharapkan para pelaku bisnis daerah termasuk para pengusaha komoditi utama Kalbar dapat mengetahui peluang pasar dan informasi pasar komoditi dunia yang didukung pelayanan surat keterangan asal (SKA/COO) untuk preferensi pajak bagi Negara-negara yang telah terikat kerjasama perdagangan dengan Indonesia.

- **Intervensi terakhir adalah melalui Hilirisasi Komoditi Utama**, yang dilakukan dengan mengupayakan a) penumbuhan dan pengembangan IKM yang mengolah komoditi daerah seperti IKM lidah buaya, IKM karet, dan IKM Kelapa; dan b) fasilitasi penumbuhan kawasan industri untuk pengolahan komoditi utama kalbar seperti karet di Kawasan Industri Mandor, Kabupaten Landak; kelapa sawit di Kawasan Industri Tayan, Kabupaten Sanggau dan Aneka Industri Agro di Kawasan Industri Semparuk. Hilirisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi sehingga diharapkan komoditi primer petani juga akan meningkat. Intervensi ini juga didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2017-2037 yang diharapkan menjadi roda penggerak pertumbuhan Industri Hilirisasi di Kalbar.

B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar berasal dari dua sumber yaitu APBD Prov. Kalbar dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Rekapitulasi anggaran beserta realisasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar dapat dilihat pada tabel di bawah:

TABEL 27 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM BERSUMBER APBD PROVINSI TA. 2017 (DALAM RUPIAH)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6
1	Program Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH)	1.688.550.000	1.649.667.999	97,70	*)
2	Program Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA)	703.969.000	671.003.722	95,32	*)
3	Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif	1.047.481.000	1.040.298.544	99,31	*)
	<i>Dukungan UPIKM</i>	<i>1.480.000.000</i>	<i>1.418.974.160</i>	<i>95,88</i>	<i>**)</i>

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	811.789.500	711.124.350	87,60	*)
5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	468.894.000	443.425.000	94,57	*)
6	Program Pengembangan Ekspor	451.656.000	429.663.800	95,13	*)
7	Program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri	288.344.000	276.921.434	96,04	*)
	<i>Dukungan UPSMB</i>	<i>1.280.000.000</i>	<i>1.247.887.166</i>	<i>97,49</i>	<i>**)</i>
8	Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan	2.985.260.000	2.797.156.727	93,70	*)
TOTAL		11.205.943.500	10.686.122.902	95,36	

Keterangan : *) Anggaran pada Dinas Perindag Prov. Kalbar

**) Anggaran pada UPT Dinas Perindag Prov. Kalbar

B.1. SASARAN STRATEGIS 1 (SS1)

“TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR ”

Sasaran strategis (SS) 1 terdiri dari 12 indikator utama (IKU) yang direalisasikan tahun 2017 sebanyak 8 IKU melalui dua program yaitu Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan(IKAHH) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.688.550.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.649.667.999,- (97,70%);serta Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 703.969.000,- dan realisasi sebesar Rp. 671.003.722,- (95,32%).

B.2. SASARAN STRATEGIS 2 (SS2)

“TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KALIMANTAN BARAT”

SS2 dengan empat Indikator Kinerja Utama dan satu IKU Provinsi dicapai melalui Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif. Program ini dilaksanakan oleh Bidang SIIPI IKM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.047.481.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.040.298.544,- (99,31%) dan UPIKM dengan panguanggaran sebesar Rp. 1.480.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.418.974.160,- (95,88%). SS2 juga mendapatkan dukungan Dana APBN pada Kementerian Perindustrian melalui Dirjen

IKM yang mengalokasikan Dekonsentrasi Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM sebesar Rp. 1.450.000.000,- dengan realisasi Rp 1.449.960.000,- (100%).

B.3. SASARAN STRATEGIS 3 (SS3)

“PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH”

SS3 dengan 13 IKU Dinas dan 3 IKU Provinsi yang direalisasikan sebanyak 8 IKU Dinas dan 3 IKU Provinsi yang dicapai melalui Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 811.789.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 711.124.350,- (87,50%); serta Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 468.894.000,- dan realisasi sebesar Rp. 443.425.000,- (94,57%) dimana kedua program ini dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri. SS3 juga mendapatkan dukungan Dana APBN pada Kementerian Perdagangan melalui Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dengan pagu setelah dilakukan pemotongan anggaran menjadi Rp. 1.196.048.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 928.273.900,- (77,61%).

B.4. SASARAN STRATEGIS 4 (SS4)

“PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR”

SS4 memiliki 10 IKU yang dicapai melalui dua program yaitu program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri dengan pagu sebesar Rp. 288.344.000,- dengan realisasi sebesar Rp.276.921.434,- (96,04%);serta Program Pengembangan Ekspor dengan pagu sebesar Rp. 451.656.000,- dan realisasi sebesar Rp. 429.663.800,- (95,13%). Selain itu SS4 juga mendapat dukungan Dana APBN Kementerian Perdagangan melalui Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dengan pagu anggaran setelah dilakukan pemotongan sebesar Rp. 538.958.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 495.728.432,- (91,98%). Program-Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri. SS4 juga didukung oleh 1 (satu) UPT yaitu UPSMB sebesar Rp. 1.280.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.247.887.166,- (97,49%) yang diakomodir pada program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri.

Berdasarkan Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan RI, diketahui bahwa UPSMB-UPSMB daerah di seluruh Indonesia telah ditempatkan sebagai pendukung tugas-tugas Standardisasi dan perlindungan konsumen di bawah Dirjen SPK. Namun demikian pada Renstra Dinas Perindag Prov. Kalbar tupoksi UPSMB masih melekat pada dukungan Program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri hingga diadakannya perubahan/revisi pada Renstra tersebut.

B.5. SASARAN STRATEGIS 5 (SS5)

“PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN EKSTERNAL DAN INTERNAL ORGANISASI”

SS 5 Merupakan sasaran strategis yang berkenaan dengan ‘*capacity building*’ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar dalam rangka terjaminnya kelancaran tugas-tugas urusan perindustrian dan perdagangan Kalimantan Barat yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian (monitoring), serta evaluasi. SS 5 memiliki lima IKU dengan pagu total sebesar Rp. 2.985.260.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.797.156.727,- (93,70%).

Untuk mengetahui realisasi anggaran dana dekonsentrasi APBN TA 2017 yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar adalah sebagai berikut:

TABEL 28 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI APBN TA. 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	1.450.000.000	1.450.000.000	1.449.960.000	100,00
2	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	1.415.557.000	1.196.048.000	928.273.900	77,61
3	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	807.793.000	538.958.000	495.728.432	91,98
TOTAL		3.673.350.000	3.185.006.000	2.873.962.332	90,23

BAB IV PENUTUP

Bab Penutup dalam laporan ini dibagi kedalam dua subbab yaitu subbab Kesimpulan dan Subbab Saran. Kesimpulan memuat ringkasan keseluruhan laporan, sementara saran merupakan usulan solusi atau tindak lanjut dalam menindaklanjuti kendala-kendala yang dihadapi.

A. KESIMPULAN

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan TUSInya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 119 tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Dalam menjalankan urusan perindustrian dan perdagangan Kalimantan Barat, pada tahun 2017 Dinas Perindag Prov. Kalbar di perkuat oleh 119 orang pegawai dengan susunan 1 orang Kepala Dinas, 1 orang sekretaris, 5 kepala bidang, 2 kepala UPT, serta 24 orang pejabat eselon IV. Dinas juga didukung oleh Pejabat fungsional seperti Penguji Mutu Barang, Arsiparis dan Penyuluh industri. Selain itu pada TA 2017 Dinas Perindag Prov. Kalbar didukung oleh 3 Satuan Kerja (Satker) yang menangani Dekonsentrasi APBN.
3. Saat ini Dinas menempati 1 unit gedung yang berlokasi di Kota Pontianak dan 2 UPT di lingkungan Dinas masing-masing menempati 1 unit gedung. Kendala yang dihadapi terkait dengan sarana prasarana adalah lantai dua gedung lama eks-Kanwil Depperindag Prov. Kalbar yang perlu direhab, lingkungan kantor perlu di lakukan perbaikan mengingat kerap terjadi banjir pada saat hujan intensitas tinggi, memerlukan tersedianya ruangan display yang berguna untuk menjadi tempat pameran tetap, display produk 88 Industri dan perdagangan serta tempat tukar menukar informasi antar pelaku-antara pelaku dengan aparat dan antara aparat dengan aparat pemerintah di Kalbar.
4. Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Perindag Prov. Kalbar menjalankan 5 sasaran strategis dengan 43 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan melalui 7 program teknis serta program-program rutin. Selain itu Dinas Perindag Prov. Kalbar juga didukung oleh 3 program nasional yang terdiri dari 1 program Kementerian Perindustrian dan 2 program kementerian perdagangan, ketiga program tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi. Pengukuran Kinerja Tahun 2017 dilakukan melalui pengukuran 35 IKU Dinas dimana terdapat

beberapa IKU yang tidak dilaksanakan pada tahun ini disebabkan adanya peralihan kewenangan pada Kab/Kota. Selain IKU dinas, Dinas Perindag juga bertanggung jawab atas pengumpulan data 4 (empat) IKU Provinsi

5. Total Anggaran yang diterima oleh Dinas Perindag Prov. Kalbar dari APBD Provinsi sebesar Rp. 25.526.175.263,- dan yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.320.231.762,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 11.205.943.500,-. Dari total belanja langsung tersebut, UPT di lingkungan Dinas Perindag Prov. Kalbar mendapatkan porsi sebesar Rp. 2.760.000.000,- sisanya sebesar Rp. 8.445.943.500,- beralokasi di Dinas. Sementara itu total anggaran yang bersumber dari Dekonsentrasi APBN Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan berjumlah Rp. 3.185.006.000,- yang terbagi ke dalam 3 satker.
6. Pencapaian atau realisasi terhadap target IKU pada TA 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - i) Sasaran strategis 1 (SS1) “tumbuh dan berkembangnya sektor Industri Kalbar” rata-rata capaian terhadap target sebesar 1987,40%
 - ii) Sasaran Strategis 2 (SS2) “Tumbuh dan berkembangnya Industri kecil dan menengah Kalbar” memperoleh rata-rata capaian sebesar 131,14%. Dimana IKU Provinsi yaitu Sektor Industri Pengolahan (IKU Provinsi) tidak dimasukkan dalam rerata capaian kinerja dinas.
 - iii) Sasaran Strategis 3 (SS3) “Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah” memperoleh rata-rata capaian sebesar 126,54 %. Sedangkan 3 IKU Provinsi yaitu Nilai Tukar Petani, Produktivitas daerah dan Konsumsi Rumah Tangga Perkapita tidak kami reratakan, karena hasil perhitungan atas data statistic terlalu berbeda jauh dengan target di RPJMD karena adanya perubahan perhitungan tahun dasar PDRB
 - iv) Sasaran Strategis 4 (SS4) “Peningkatan Ekspor daerah dan pengendalian impor” rata-rata capaian yang diperoleh sebesar 203,73 %.
 - v) Sasaran Strategis 5 (SS5) “Peningkatan Kualitas kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi” rata-rata capaian sebesar 102,67%.
7. Realiasi Keuangan per sasaran strategis dirincikan sebagai berikut:
 - i) SS 1 terdiri dari Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) dengan anggaran sebesar Rp. 1.688.550.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.649.667.999,- (97,70%); Program Pengembangan Industri

Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA) dengan anggaran sebesar Rp. 703.969.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 671.003.722,- (95,32

- ii) SS 2 terdiri dari Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif memiliki anggaran sebesar Rp.1.047.481.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.040.298.544,- (99,31%) yang didukung oleh UPIKM dengan anggaran sebesar Rp.1.480.000.000,- dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.1.418.974.160,- (95,88%). Dukungan Dekosentrasi APBN dari Kementerian Perindustrian dalam Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 1.450.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.449.960.000,- (100%).
- iii) SS3 terdiri dari Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 811.789.500,-, dengan realisasi sebesar Rp. 711.124.350,- (87,60%); Program Perlindungan Konsumen pada Dinas dengan anggaran sebesar Rp. 468.894.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 443.425.000,- (94,57%). Sementara itu Dekosentrasi APBN dalam Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri memiliki anggaran sebesar Rp.1.196.048.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 928.273.900,- (77,61%).
- iv) SS4 terdiri dari Program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 288.344.000,- realisasi sebesar Rp. 276.921.434,-(96,04%) dan dukungan dari UPSMB dengan anggaran sebesar Rp. 1.280.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.247.887.166,- (97,49%). Yang kedua adalah Program Pengembangan ekspor dengan anggaran sebesar Rp. 451.656.000,- terealisasi sebesar Rp. 429.663.800,- (95,13 %). Sementara itu dukungan Dekosentrasi APBN dalam Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri memiliki anggaran sebesar Rp.538.958.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 495.728.432,- (91,98%).
- v) SS5 yang merupakan sasaran untuk peningkatan kapasitas Kantor (*Capacity Building*) dalam rangka penunjang atau pendukung kegiatan-kegiatan urusan perindustrian dan Perdagangan terdiri dari program-program di bawah kesekretariatan atau yang biasa dikenal dengan kegiatan rutin namun sangat berperan dalam pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.985.260.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.797.156.727,- (93,70%).

B. SARAN

Dalam Subbab ini digambarkan secara ringkas permasalahan terkini urusan perindustrian dan perdagangan serta solusi atau tindak lanjut yang dapat diambil.

B.1. Permasalahan

1. Penurunan Ekspor Kalbar sejak tahun 2014 sebagai akibat Lemahnya Struktur ekspor dan belum efisiennya sistim Logistik Ekspor-Impor Kalbar, dimana produk ekspor Kalbar di dominasi komoditi utama (karet, kayu, bahan tambang skrg CPO dan alumina) yang saat ini sedang mengalami trend turunnya harga komoditi dunia terutama Karet, CPO dan lainnya. Sedangkan belum efisiennya sistim Logistik Ekspor-Importerutama disebabkanKetersediaan & keterbatasan Infrastruktur dan outlet ekspor-impor (pelabuhan laut, terminal ekspor-impor) a.l. Keterbatasan Pelabuhan ekspor-impor di Pelabuhan Pontianak dan Belum tersedianya pintu ekspor-impor resmi dan representative di daerah perbatasan yang jauh dari pelabuhan utama Pontianak untuk ekspor komoditi daerah pedalaman dan perbatasan yang didukung dengan fasilitas Good in Transit. Namun demikian dalam tahun ini diharapkan penataan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah dapat diselesaikan dan diharapkan pembangunan terminal barang juga dapat segera dilaksanakan. Saat ini Kanwil Bea dan Cukai juga telah menetapkan Kawasan Kepabean di tiga PLBN yaitu Aruk, Entikong dan Badau.
2. Seiring dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya dukungan anggaran yang lebih maksimal untuk dapat melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa yang saat ini telah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga perlindungan konsumen dapat terus dilaksanakan.
3. Peralihan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatas, belum selaras dengan penambahan kuantitas SDM yang menangani permasalahan tersebut. Dengan cakupan wilayah yang luas serta terbatasnya SDM mengakibatkan belum maksimalnya implementasi terutama terkait dengan pengawasan yang ada di Kab/Kota.
4. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Tahun Anggaran 2017, masih dirasakan keterbatasan anggaran pengembangan industri daerah dibandingkan besarnya tuntutan dunia usaha dan masyarakat terhadap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi sektor industri termasuk IKMKalbar. Terlebih lagi dengan cepatnya mutasi ASN baik di Provinsi dan Kabupaten/kota terutama aparat yang membidangi industri, dan keterbatasan infrastruktur penunjang Industri menyebabkan masih kurang maksimal Perkembangan industri Kalimantan Barat terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

B.2. Solusi

Solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Ekspor. Disatu sisi, peningkatan kinerja ekspor perlu dilakukan melalui upaya-upaya diversifikasi negara tujuan ekspor dari negara tradisional ke negara tujuan non-tradisional terutama ke Negara-negara Timur Tengah, Amerika latin, Afrika, Asia Tengah dan Eropa Timur. Disisi lain, perlu dilakukan upaya-upaya diversifikasi jenis komoditi dan produk ekspor, Kalimantan Barat, terutama pada produk dan komoditi yang diminati pasar Peranan Atase perdagangan dan atau kantor dagang indonesia akan menjadi sangat penting untuk memfasilitasi diversifikasi tujuan dan komoditi. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalbar tengah Mendorong percepatan Revisi Permendag 35/1995 Penetapan sebagai pintu ekspor dan impor pada PPLB Entikong dan Badau serta Tempat Penimbunan sementara kepabeian (Bongkar muat) didukung percepatan pembangunan Terminal Barang Ekspor Impor pada PPLB tersebut dan secara bersamaan mendorong Pemerintah untuk mempercepat upaya-upaya ekspor melalui mekanisme *goods in transit* untuk komoditi CPO dan komoditi lainnya melalui pelabuhan di Sarawak – Malaysia.
2. Perlunya mekanisme khusus dengan melibatkan Kabupaten/kota agar dapat melayani pengawasan barang beredar hingga seluruh wilayah Kab/kota se-Kalbar mengingat luasnya cakupan wilayah serta terbatasnya SDM pada Dinas Perindag Prov. Kalbar yang menangani masalah tersebut.
3. Dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat, agar segera mendorong Kab/Kota untuk dapat kembali menungkannya dalam Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) sehingga terdapat keselarasan dalam rencana pembangunan industri antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota.
4. Pendataan unit usaha Industri yang ada saat ini telah menerapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Namun dalam implementasinya, diketahui bahwa sangat diperlukannya pengelompokan industri terutama IKM berdasarkan potensi, skala pemasaran, kualitas, dan lain sebagainya untuk mempermudah pengambilan keputusan sebagai langkah kedepannya dalam penumbuhan, pembangunan dan pengembangan industri di Kalimantan Barat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Capaian Kinerja Tahun 2017		Tingkat Kemajuan (%)
					Target	Realisasi	
1	2	3		5	6	7	8
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1	Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar pertahun	%	3	3,03	101,00
		1.2	Jumlah pertambahan industri	%	2	1,95	97,50
		1.3	Jumlah kawasan industri yang difasilitasi	Kawasan	4	4	100,00
		1.4	Dukungan persebaran dan penguatan industri	Kab/Kota	6	6	100,00
		1.5	Jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi	Unit Usaha	2	8	400,00
		1.6	Jumlah industri prioritas provinsi yang difasilitasi	Unit Usaha	-	-	-
		1.7	Jumlah industri yang difasilitasi melalui penerapan industri hijau	Unit Usaha	-	-	-
		1.8	Jumlah rekomendasi IUI	Dokumen	-	-	-
		1.9	Dukungan pengembangan Alsintan Center	Kab/Kota	1	1	100,00
		1.10	Pengembangan Industri Alat Angkut	Unit Usaha	1	5	500,00
		1.11	Pengembangan Industri Galangan Kapal	Lokasi	-	-	-
		1.12	Dukungan hilirisasi bahan tambang	Komoditi	1	1	100,00
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1					
2	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KALBAR	2.1	Pertumbuhan jumlah IKM formal Kalbar	%	2	2,06	103,00
		2.2	Jumlah IKM Kalbar yang difasilitasi	Unit Usaha	80	100	125,00
		2.3	Sentra Industri kreatif berbasis IT	Lokasi	1	1	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Capaian Kinerja Tahun 2017		Tingkat Kemajuan (%)
					Target	Realisasi	
1	2	3		5	6	7	8
		2.4	Jumlah IKM Wirausaha baru yang tumbuh dan berkembang	Unit Usaha (IKM)	175	344	196,57
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 2					131,14
3	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	3.1	Laju inflasi Kalimantan Barat	%	5	3,86	129,53
		3.2	Produk yang dipromosikan dalam negeri	Jenis	10	10	100,00
		3.3	Jumlah Gudang dengan sistem resi gudang	Unit	2	2	100,00
		3.4	Jumlah pasar tradisional yang dibina	Pasar	4	4	100,00
		3.5	Jumlah SIUP, TDP, dan TDG yang terdata	Perusahaan	5000	7876	157,52
		3.6	Jumlah pengaduan Konsumen	Kasus	60	26	230,80
		3.7	Jumlah wajib tera/tera ulang	Orang	-	-	-
		3.8	Jumlah barang beredar yang diawasi	Jenis	18	20	111,11
		3.9	Jumlah BPSK yang terbentuk	Kab/ Kota	6	5	83,33
		3.10	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab Kemetrolgian	%	-	-	-
		3.11	Peningkatan Jumlah dan kompetensi SDM Kemetrolgian	Orang	-	-	-
		3.12	Jumlah Alat UTTP yang ditera / tera ulang	Unit	-	-	-
		3.13	Persentase Kecamatan yang dilayani	%	-	-	-
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 3					126,54
4	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	4.1	Neraca Perdagangan	US\$ Juta	200	558,23	279,12
		4.2	Kerjasama Ekonomi regional	Dokumen	1	1	100,00
		4.3	Jumlah eksportir baru	Unit Usaha	10	27	270,00
		4.4	Jumlah Kontak dagang	Kali	10	18	180,00
		4.5	Nilai Ekspor Kalimantan	US\$ Juta	675	827,3	122,56

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Capaian Kinerja Tahun 2017		Tingkat Kemajuan (%)
					Target	Realisasi	
1	2	3		5	6	7	8
			Barat				
		4.6	Pelayanan Dokumen Ekspor Impor Secara Online	Dokumen	1.900	3.715	195,53
		4.7	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab. Pengujian dan Kalibrasi sertifikasi mutu barang	Ruang Lingkup	9	11	122,22
		4.8	Jumlah SDM fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	2	3	150,00
		4.9	Jumlah pengujian mutu produk	Sample	220	885	402,27
		4.10	Jumlah kalibrasi alat lab	Alat	350	861	246,00
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 4					206,77
5	PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN EKSTERNAL DAN INTERNAL ORGANISASI	5.1	Operasional pelayanan Kantor	Bulan	12	12	100,00
		5.2	Jumlah dokumen perencanaan indag Kalbar	Dokumen	2	2	100,00
		5.3	Data spasial indag Kalbar	Kab/Kota	2	2	100,00
		5.4	Peningkatan SDM aparatur indag	Orang	15	17	113,33
		5.5	Jumlah forum sinergi pengembangan indag	Forum	1	1	100,00
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 5					102,67

Jumlah Total Anggaran Sasaran Startegis Tahun 2017 : Rp. 14.879.293.500,-
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Startegis Tahun 2017: Rp. 13.871.128.902,-

LAMPIRAN 2 TARGET KINERJA TAHUN 2018

TARGET KINERJA 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Target Kinerja Tahun 2018
1	2	3		4	5
1	TUMBUH DAN BERKEMBANG NYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1	Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar pertahun	%	3
		1.2	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi	Komoditi	4
		1.3	Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Industri	Kawasan Industri & SIKIM	3 KI & 4 SIKIM
		1.4	Tersedianya pusat pengembangan industri berbasis IT	Lokasi	1
		1.5	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Angkut	lokasi	1
		1.6	Jumlah SDM industri yang difasilitasi disertifikasi kompetensi	orang	20
		1.7	Peningkatan alsintan center	lokasi	1
		1.8	Peningkatan SDM IKM	Orang	80
		1.9	Jumlah IKM yang tumbuh dan berkembang.	Unit Usaha	200
2	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	2.1	Inflasi (Kelompok Bahan Makanan)	%	5,2
		2.2	Rasio Kasus Pengaduan Konsumen yang Ditindak Lanjuti	%	85
3	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	3.1	Neraca Perdagangan	US\$ Juta	225
		3.2	Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ Juta	700
		3.3	Pelayanan Dokumen Ekspor Impor Secara Online	Dokumen	2000
		3.4	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab. Penguji	Jenis Uji	11

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Target Kinerja Tahun 2018
1	2	3		4	5
		3.5	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab. Kalibrasi	Parameter ukur	23
		3.6	Jumlah pengujian mutu produk	Sampel	240
		3.7	Jumlah kalibrasi alat ukur	Alat	450

LAMPIRAN 3 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon (0561) 732610 - 766127 - 732740 - 769709 - 734917 Fax. (0561) 766128

E-mail : kakw-kalbar@dprin.go.id

PONTIANAK - 78116

Kotak Pos 1079

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. CORNELIS, MH**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2017

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. CORNELIS, MH

MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19600310 198203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1 Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar pertahun	3 %
		1.2 Jumlah pertambahan industri	2 %
		1.3 Jumlah kawasan industri yang difasilitasi	4 Kawasan
		1.4 Dukungan persebaran dan penguatan industri	6 Kab/Kota
		1.5 Jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi	2 Unit Usaha
		1.6 Jumlah industri prioritas provinsi yang difasilitasi	-
		1.7 Jumlah industri yang difasilitasi melalui penerapan industri hijau	-
		1.8 Jumlah rekomendasi IUI	-
		1.9 Dukungan pengembangan Alsintan Center	1 Kab/Kota
		1.10 Pengembangan Industri Alat Angkut	1 Kab/Kota
		1.11 Pengembangan Industri Galangan Kapal	-
		1.12 Dukungan hilirisasi bahan tambang	1 Lokasi
2	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KALBAR	2.1 Pertumbuhan jumlah IKM formal Kalbar	2 %
		2.2 Jumlah IKM Kalbar yang difasilitasi	80 Unit Usaha
		2.3 Sentra Industri kreatif berbasis IT	1 Lokasi
		2.4 Jumlah IKM Wirausaha baru yang tumbuh dan berkembang	175 Unit Usaha
		2.5 Sektor Industri Pengolahan	175 IKM
3	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	3.1 Laju inflasi Kalimantan Barat	5 %
		3.2 Produk yang dipromosikan dalam negeri	10 Jenis
		3.3 Jumlah Gudang dengan sistem resi gudang	2 Unit
		3.4 Jumlah pasar tradisional yang dibina	4 Pasar
		3.5 Jumlah SIUP, TDP, dan TDG yang terdata	5.000 Perusahaan
		3.6 Jumlah pengaduan Konsumen	60 Kasus
		3.7 Jumlah wajib tera/tera ulang	-
		3.8 Jumlah barang beredar yang diawasi	18 Jenis
		3.9 Jumlah BPSK yang terbentuk	6 Kab/ Kota
		3.10 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab Kemetrolgian	-
		3.11 Peningkatan Jumlah dan kompetensi SDM Kemetrolgian	-
		3.12 Jumlah Alat UTTP yang ditera / tera ulang	-
		3.13 Persentase Kecamatan yang dilayani	-
		3.14 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	1.142
		3.15 Produktivitas total daerah	18.07
		3.16 Nilai Tukar Petani	102.87
4	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	4.1 Neraca Perdagangan	US\$ 200 Juta
		4.2 Kerjasama Ekonomi regional	1 Dokumen
		4.3 Jumlah eksportir baru	10 Unit Usaha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		
1	2	3	4		
		4.4 Jumlah Kontak dagang	10 Kali		
		4.5 Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ 675 Juta		
		4.6 Pelayanan Dokumen Ekspor Impor Secara Online	1.900 Dokumen		
		4.7 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab. Pengujian dan Kalibrasi sertifikasi mutu barang	9 Ruang Lingkup		
		4.8 Jumlah SDM fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya	2 Orang		
		4.9 Jumlah pengujian mutu produk	220 Sample		
		4.10 Jumlah kalibrasi alat lab	350 Alat		
		5	PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN EKSTERNAL DAN INTERNAL ORGANISASI	5.1 Operasional pelayanan Kantor	12 Bulan
				5.2 Jumlah dokumen perencanaan indag Kalbar	2 Dokumen
				5.3 Data spasial indag Kalbar	2 Kab/Kota
5.4 Peningkatan SDM aparatur indag	15 Orang				
5.5 Jumlah forum sinergi pengembangan indag	1 Forum				

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH)	Rp. 1.688.550.000	APBD
2.	Program Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA)	Rp. 703.969.000	APBD
3.	Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif	Rp. 1.047.481.000	APBD
	Dukungan UPIKM	Rp. 1.480.000.000	APBD
4.	Program Revitalisasi IKM	Rp. 1.450.000.000	APBN
5.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 811.789.500	APBD
6.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 468.894.000	APBD
7.	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 1.415.557.000	APBN
8.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 451.656.000	APBD
9.	Program Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri	Rp. 288.344.000	APBD
	Dukungan UPSMB	Rp. 1.280.000.000	APBD
10.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Rp. 807.793.000	APBN
11.	Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan	Rp. 2.985.260.000	APBD
TOTAL		Rp. 14.879.293.500	APBD + APBN

Pontianak, Februari 2017

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Drs. CORNELIS, MH

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat,

MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19600310 198203 1 011